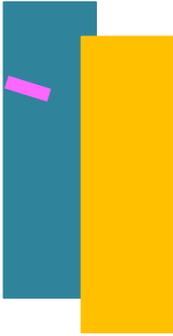


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2024



Kata Pengantar



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan detail kinerja dan keuangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang terjabarkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur tingkat pencapaian kinerja. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja urusan Perhubungan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

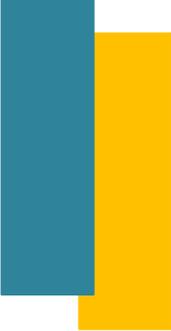
Polewali Mandar, 30 Januari 2024
**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Polewali Mandar**



Drs. ACO DJALALUDDIN AM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651231 199203 1 260



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2019-2024. Ringkasan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar yang dihasilkan tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Sasaran : Meningkatnya kinerja transportasi dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2024, target 120 kejadian Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas), sementara Lakalantas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 312 kasus, sehingga capaian kinerja 39%. Berdasarkan itu, maka angka Lakalantas Tahun 2024 mengalami Peningkatan 3% dari 311 kejadian pada tahun 2023.

B. Indikator Program : Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik

Sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik, target kinerja 96.55% dan realisasi 93.31%, dalam artian capaian kinerja mencapai 97%.

Tahun 2024, tidak ada pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan masih pada angka 1216 unit.hanya terjadi penambahan pemeliharaan portal 11 Unit hal ini di sebabkab pada tahun 2024 24 terjadi rekkofusing anggaran

C. Indikator Program : Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman

Pada Tahun 2024, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 74% dan realisasi 118%, dalam artian terdapat kenaikan capaian kinerja mencapai 60%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.

D. Indikator Program : Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan.

pada tahun 2024, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 52.32% realisasi 100% capaian kinerja 104%.

e. Indikator sasaran pada segmen manajemen perkantoran, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan : IKM dengan mutu pelayanan A (Baik), Predikat SAKIP BB dan Opini Keuangan WDP;

f. Realisasi keuangan, PAGU anggaran sebesar Rp 3.698.750.731 realisasi Rp 3.632.381.964 atau terealisasi sebesar 98.21%.

g. Terdapat 11 kegiatan pada 2 program: *pertama*, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Kegiatan Pertama Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kedua Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ketiga Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah keempat Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kedua Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pertama Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota kedua Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C ketiga Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir keempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kelima Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota keenam Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ketujuh Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan. Untuk itu, fokus dan melakukan koordinasi dan komunikasi

terhadap berbagai stakeholder dalam menekan dan mengantisipasi lonjakan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR CHART	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud	3
D. Tujuan	3
E. Sumber Daya Manusia	4
F. Issu Strategis	8
G. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Penetapan Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	14
A. Akuntabilitas Kinerja	14
B. Akuntabilitas Keuangan	74
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
LAMPIRAN	83

Daftar Tabel

II.1 Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	11
II.2 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja	12
II.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan	13
III.1 Capaian Kinerja	15
III.2 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Saprass	27
III.3 Titik Rawan Kecelakaan dan Kepadatan	33
III.4 Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas	36
III.5 Titik Lokasi Parkir Tertib	41
III.6 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Titik Rawan	42
III.7 Kendaraan Laik Jalan	48
III.8 Kendaraan uji KIR	49
III.9 Layanan Angkutan Darat	53
III.10 Angkutan dan Penumpang Keluar-Masuk Terminal	53
III.11 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Angkutan Keselamatan	58
III.12 Hasil IKM dan RTL	64
III.13 Realisasi dan Refokushing Anggaran Indikator IKM	66
III.14 Realisasi dan Refokushing Anggaran Indikator Predikat SAKIP	69
III.15 Realisasi dan Refokushing Anggaran Indikator Opini Keuangan	72
III.16 Target dan Realisasi PAD	74
III.17 LRA Tahun 2024	76
III.18 Total PAGU dan Refokushing	77

Daftar Chart

I.1	SDM Dinas Perhubungan	4
I.2	Jabatan Dinas Perhubungan	4
I.3	Kualifikasi Pendidikan	5
I.4	Kepangkatan Dinas Perhubungan	5
III.1	Lakalantas Tahun 2019-2024	17
III.2	Korban dan Kerugian Materiil Lakalantas	18
III.3	Fatalitas Kecelakaan	19
III.4	Fatalitas dari korban jiwa	20
III.5	Sapras Perhubungan dalam Kondisi Baik	23
III.6	Sapras dan Kelengkapan Perhubungan	24
III.7	Sapras dan Kelengkapan Perhubungan	25
III.8	Persentase Titik Rawan Kecelakaan Tertib Aman	31
III.9	Titik Rawan Kecelakaan Tertib Aman	32
III.10	Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas	35
III.11	Ketertiban Titik Lokasi Parkir	40
III.12	Angkutan Umum sesuai Standar Keselamatan	46
III.13	Persentase Kendaraan Uji KIR	47
III.14	Jumlah Kendaraan Uji KIR	49
III.15	Layanan Angkutan Darat Tahun	52
III.16	Nilai Konversi IKM	65



BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good governance*), dimana akan terlihat proses manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk maksud tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan per undang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024.

B. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 80) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 29 Juli 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;

11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

C. Maksud

2. Sebagai salah satu bahan ukuran akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
3. Sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

D. Tujuan

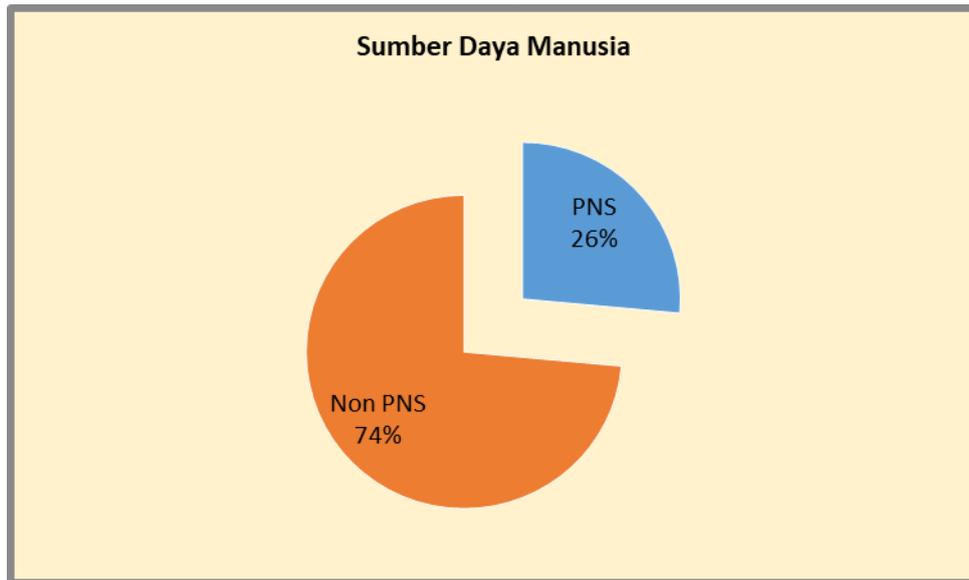
1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

E. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan didukung sumber daya manusia sebanyak 34 (tiga puluh dua orang) dengan rincian 19 orang pejabat eselon dan 12 jabatan fungsional umum.

Chart I.1

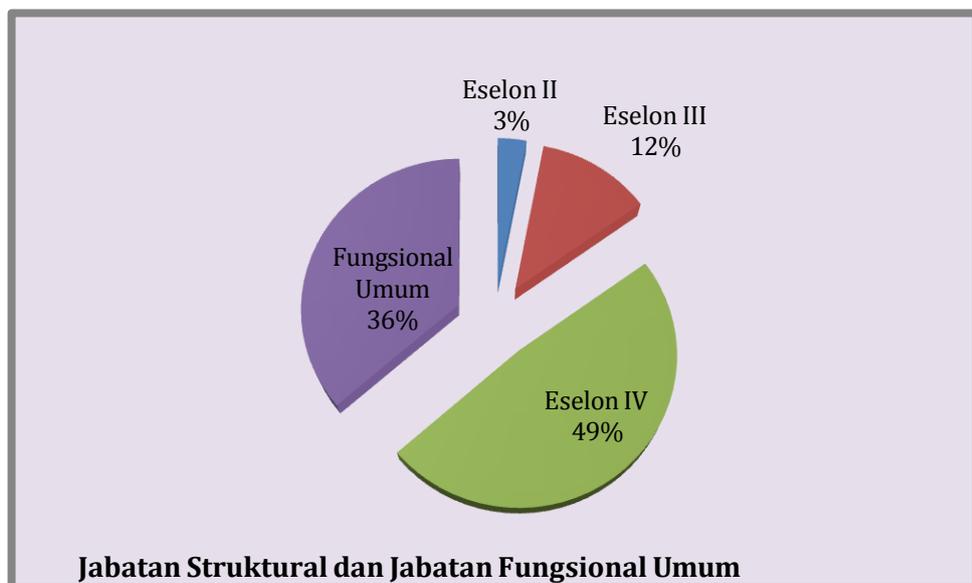
SDM Dinas Perhubungan Tahun 2024



Pejabat Struktural 21 orang dengan perincian: Eselon II : 1 orang, Eselon III : 4 orang, dan Eselon IV : 16 orang. Sementara Pejabat Fungsional : - orang, Fungsional umum : 12 orang, sedangkan Non-PNS : 90 orang.

Chart I.2

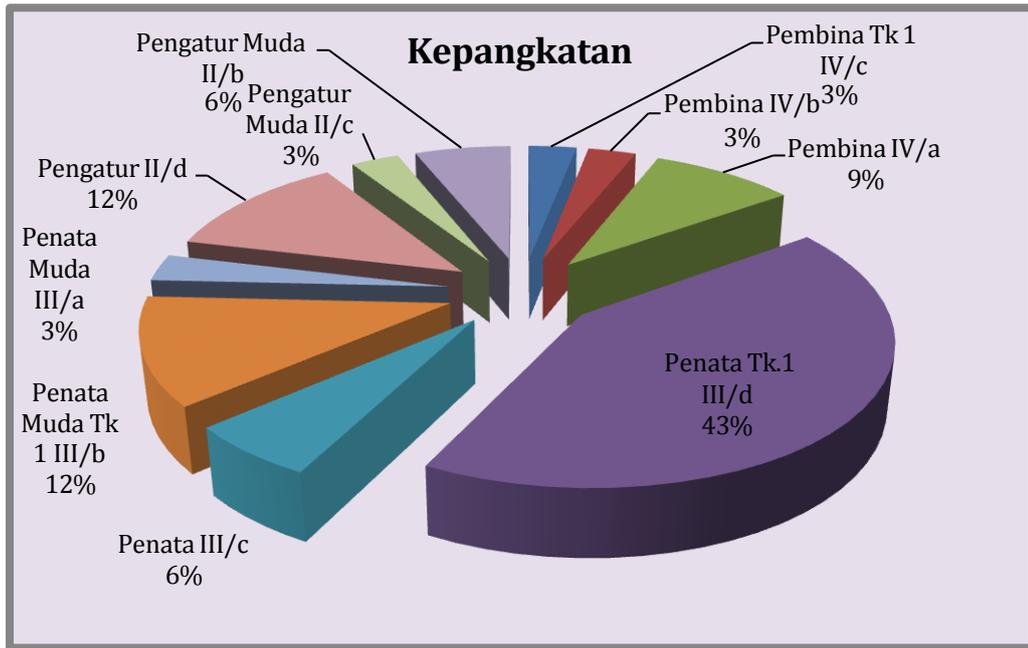
Jabatan Dinas Perhubungan Tahun 2024



Untuk kepangkatan, Golongan IV/c : 1 orang, IV/b : 1 orang, IV/a : 3 orang, III/d : 14 orang, III/c : 2 orang, III/b : 4 orang, III/a : 1 orang, II/d : 4 orang, II/c : 1 orang dan II/b : 2 orang

Chart I.3

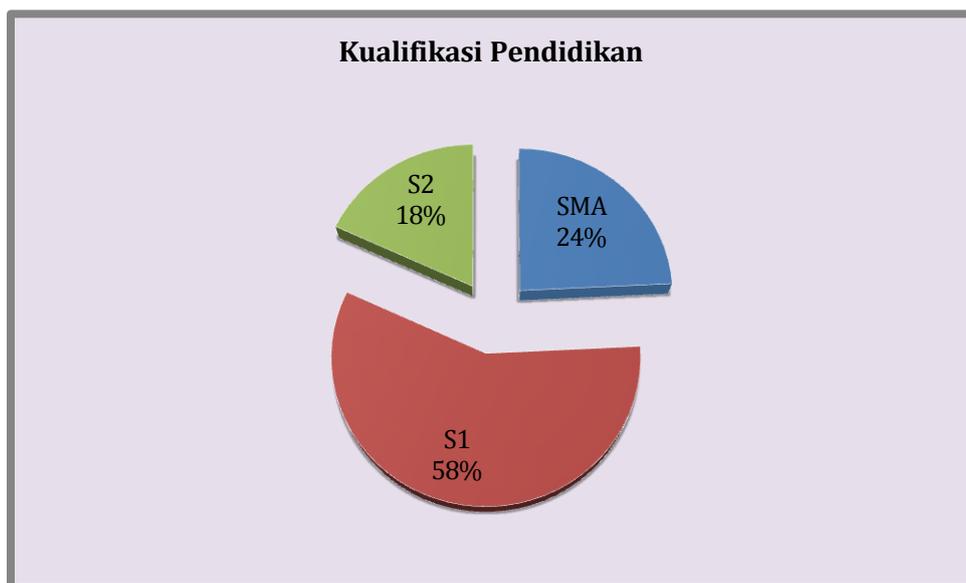
Kepangkatan Dinas Perhubungan Tahun 2023



Kualifikasi Pendidikan : S2 : 6 orang, S1 : 19 orang, D3 : 0 orang, SMA : 8 orang, SMP/SD : - orang.

Chart I.4

Kualifikasi Pendidikan Dinas Perhubungan Tahun 2023



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

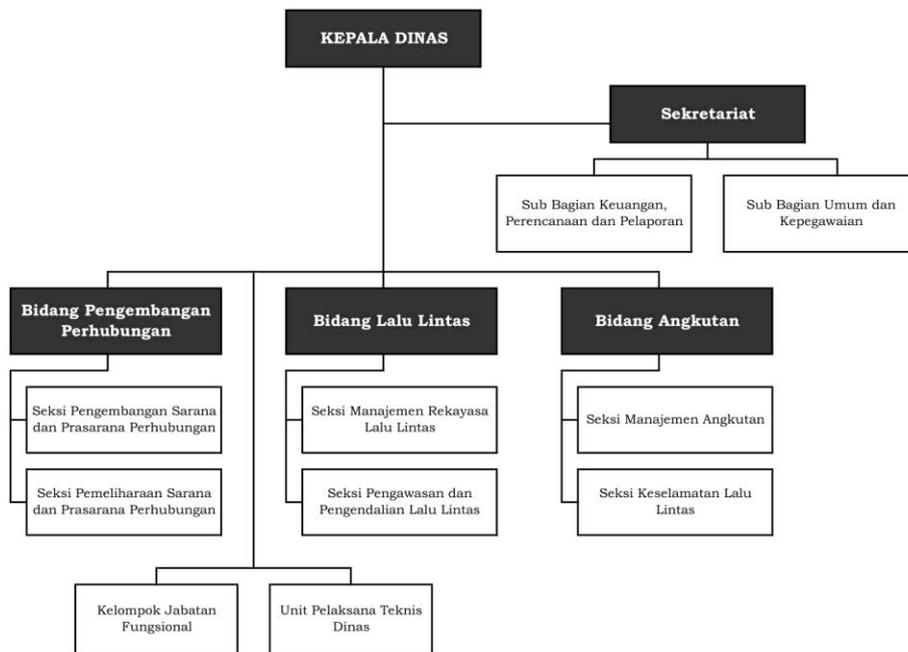
- 1) Kepala Dinas Perhubungan.
- 2) Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan
- 4) Kepala Bidang Lalu Lintas
 - a. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas
- 5) Kepala Bidang Angkutan
 - a. Kepala Seksi Manajemen Angkutan
 - b. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. UPTD Terminal
 - c. UPTD Perparkiran
 - d. UPTD Kepelabuhanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan satuan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MADAR

F. **Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Rumusan isu strategis berikut berdasarkan rumusan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024, Berikut rumusan isu strategis terkait urusan perhubungan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024 :

1. Angka kecelakaan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas
2. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan dan konektivitas;
3. Rencana pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Polewali Mandar, akan menempatkan Polewali Mandar pada posisi strategis diantara daerah lain dan isu pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
4. Optimalisasi fungsi dan status Pelabuhan Tanjung Silopo;
5. Bekembangannya bisnis transportasi dan meningkatnya pemanfaatan kendaraan pribadi;
6. Standar keselamatan angkutan dan angkutan umum berplat Hitam
7. Penurunan minat pemanfaatan angkutan umum dan ketidakjelasan trayek angkutan umum
8. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya PJU (Penerangan Jalan Umum) dalam Mengurangi resiko angka kecelakaan;
9. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.

Diantara rumusan strategis berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024, terdapat beberapa isu dominan selama tahun 2023 diantaranya :

1. Kecelakaan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas;
2. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan dan konektivitas;
3. Rencana pembangunan FS Bandara : kesiapan dokumen perencanaan;
4. Standar keselamatan angkutan terkait peran dan fungsi pengujian kendaraan bermotor;
5. Operasionalisasi angkutan umum dan Trayek
6. Pengelolaan Parkir dan pengesahan Parkir berlangganan

G. Sitematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Perencanaan Strategis; dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun Keempat periode kepemimpinan daerah Kabupaten Polewali Mandar. sejak awal tahun 2024 perencanaan kinerja urusan perhubungan dapat dilakukan dalam upaya menjaga konsistensi pada rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategik yang disusun oleh Instansi Pemerintah harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Tabel II.1
Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Tahun 2024

VISI			
POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA			
MISI			
1	2	3	4
Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

MISI			
3			
Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan			
TUJUAN 1	TUJUAN 2		
Meningkatkan Kinerja Transportasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, mengacu kepada Rencana Strategis, alokasi anggaran dan kemampuan sumber daya lainnya.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Dishub Tahun 2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
				2024
1	Meningkatkan Kinerja Sistem Transportasi Daerah	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	120 kejadian
			Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	96,55%
			Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	65.00%
			Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	54.45%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP



BAB III

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 dan juga berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Dari dokumen tersebut, terdapat dua (2) tujuan, empat (4) sasaran dengan empat (4) indikator. Sedangkan yang menjadi fokus dalam LAKIP Tahun 2024 berfokus pada sasaran meningkatnya kinerja transportasi daerah dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Dari itu, terdapat tiga (3) indikator program yang menjadi fokus capaian laporan ini, pertama persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman dan persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan. Dari masing-masing indikator terdapat korelasi dan berfokus pada tiga hal, pertama sarana prasarana perhubungan, kedua ketertiban dan keamanan lalu lintas pada titik rawan kecelakaan dan yang ketiga terkait standar keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Dalam pemaparan ini akan dijabarkan secara komprehensif turunan dari indikator program sampai pada level indikator kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Analisis dan evaluasi juga dilakukan untuk menghitung target capaian dan realisasi setiap indikator kinerja dengan tentu mengungkap kendala dan solusi masing-masing.

Pengukuran Kinerja, Skala Predikat dan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menganalisis tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing indikator terkait. Rumus untuk menghitung capaian kinerja indikator terdapat dua macam :

1. Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya, semakin kecil realisasi semakin buruk kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya kinerjanya, atau sebaliknya, semakin kecil realisasi semakin baik kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

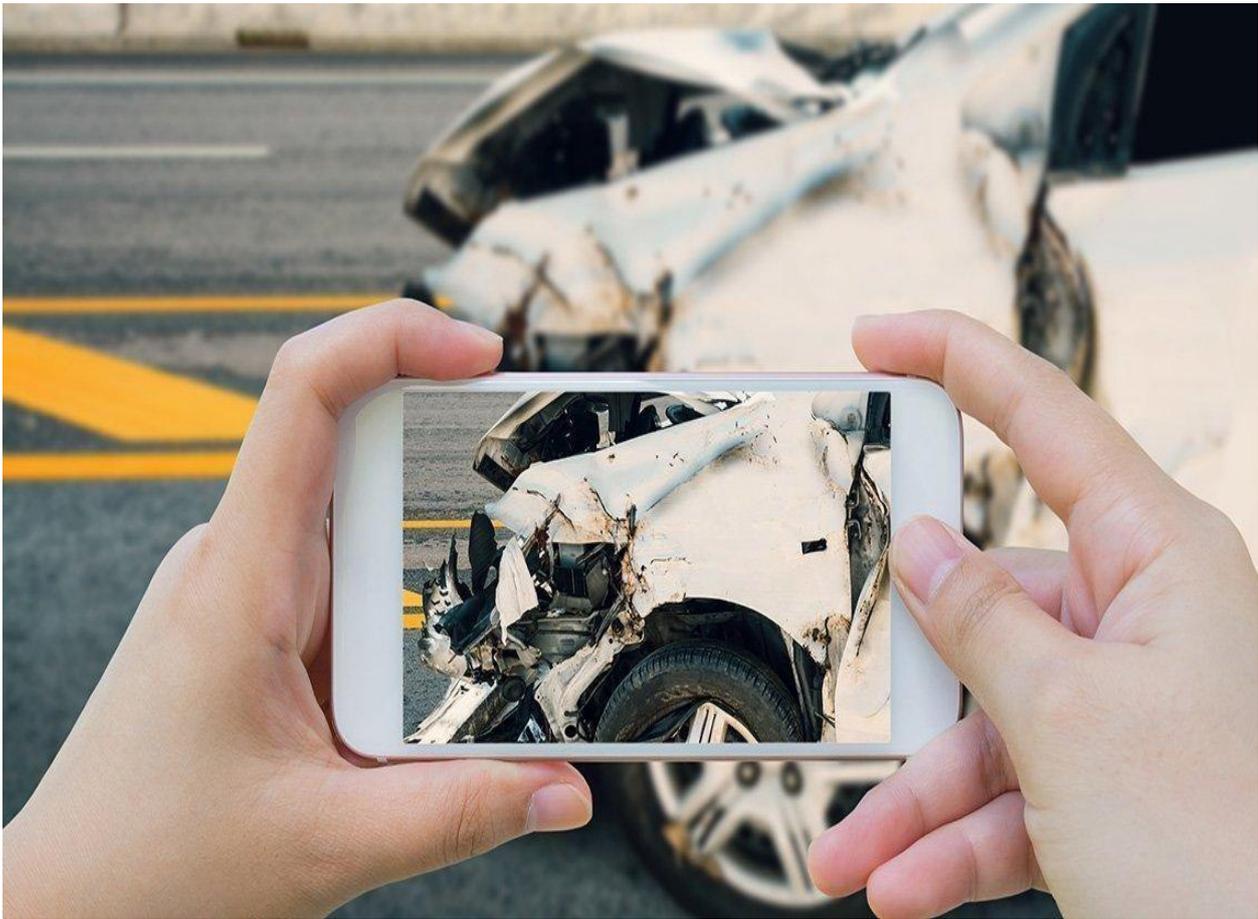
$$\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100\%$$

Dalam laporan ini, indikator negatif digunakan untuk mengukur kinerja sasaran meningkatnya kinerja transportasi daerah dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95% s.d <100%	Sangat Berhasil
80% s.d 95%	Berhasil
50% s.d <80%	Cukup Berhasil
0% s.d <50%	Tidak Berhasil

Tabel III.1

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
				2024
1	Meningkatkan Kinerja Sistem Transportasi Daerah	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	120 kejadian
			Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	94.02%
			Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	78.33%
			Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	72.81%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP



SASARAN 1

Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah

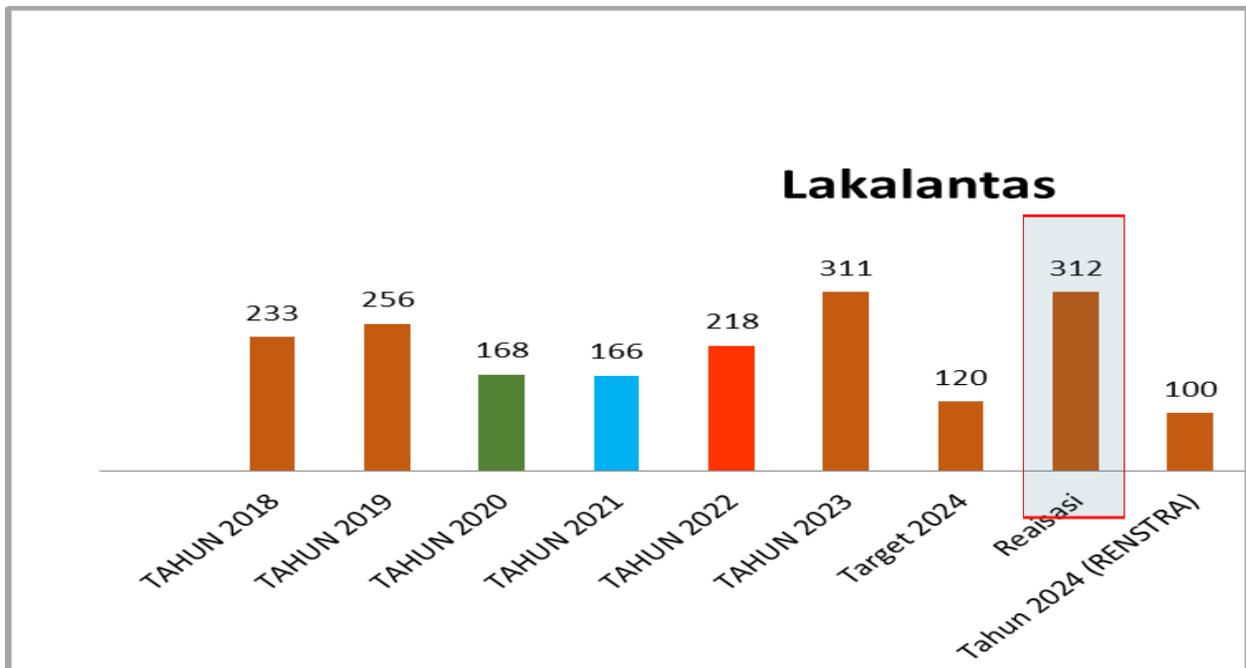
Indikator

Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Target

120 Kejadian

Chart III.1
Lakalantas Tahun 2018-2024 dan target akhir Renstra



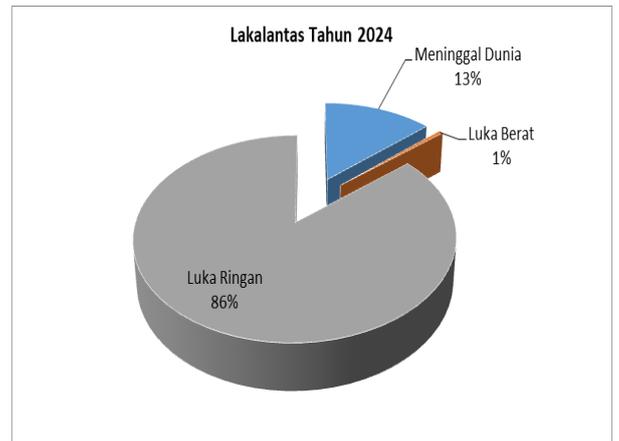
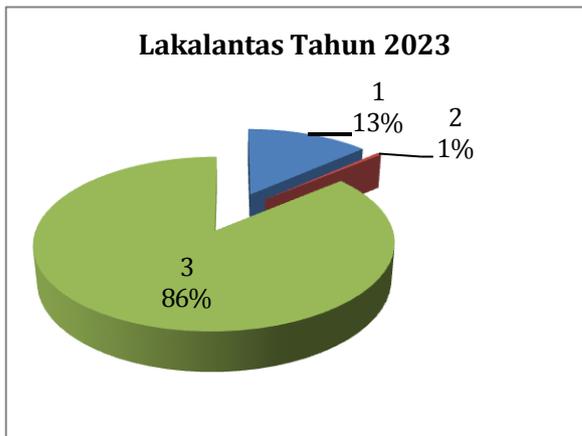
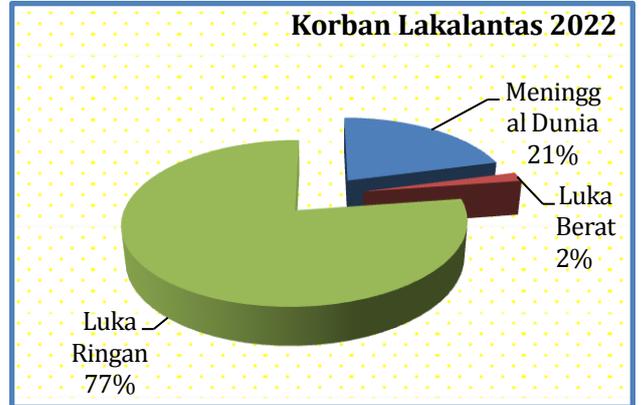
Dengan hitungan indikator negatif, capaian kinerja tahun 2024 untuk menekan angka Lakalantas yang mencapai 39%. Capaian kinerja dasar tahun 2018-2022 berangkat dari angka 191%. Kemudian, bila disandingkan dengan target akhir Renstra yakni 100 kejadian Lakalantas, maka kinerja tahun 2024 mencapai 32%. Berdasarkan chart tersebut juga tergambar, bahwa angka Lakalantas Tahun 2023 mengalami Peningkatan 71% kejadian dari tahun 2022.

Dari sisi target kinerja tidak terlampaui. Hal ini disebabkan selama tahun 2024 kondisi alam berupa banjir menyebabkan banyaknya jalan yang rusak. Meskipun, Lakalantas tetaplah merupakan kejadian insidental yang merugikan. Kelalaian manusia, kondisi jalan dan kendaraan merupakan faktor dominan Lakalantas. Namun, keberadaan fasilitas keselamatan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan juga penerapan standar keselamatan jalan angkutan serta pengaturan pengamanan lalu lintas juga di antara upaya yang dilakukan dalam menekan laju Lakalantas di Kabupaten Polewali Mandar.

Chart III.2

Korban dan Kerugian Materiil Lakalantas Tahun 2019-2024

Sumber : Polres Polman



Lakalantas di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, mencapai 233 kejadian dengan 62 korban meninggal dunia, 11 orang luka berat dan 326 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 238.650.000. Tahun 2019, sebanyak 256 kejadian dengan 60 korban meninggal dunia, 0 orang luka berat dan 275 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 156.000.000.

Sedangkan tahun 2020, jumlah kejadian mencapai 168 dengan 40 korban meninggal dunia dan 180 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 195.050.000. Tahun 2021, Lakalantas 166 kejadian dengan 34 korban meninggal dunia, 3 luka berat dan 178 orang luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 170.600.000, pada tahun 2022 jumlah Lakalantas 218 kejadian dengan 56 korban meninggal dunia, 5 luka berat dan 208 orang luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 319.000.000, dan pada tahun 2023 jumlah kejadian lakalantas 311 dengan korban meninggal dunia 54 orang, luka berat 3 dan luka ringan 330 orang

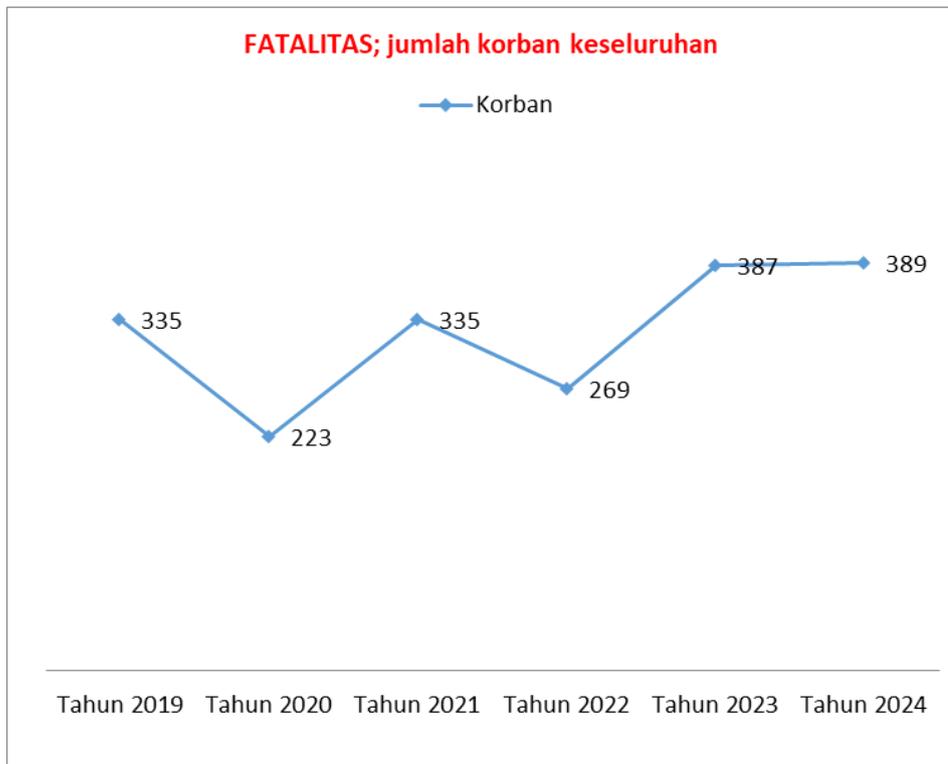
Dari data di atas bisa dicermati, jumlah korban dan kerugian materiil sangat fluktuatif, meskipun dari sisi kejadian tahun 2023 mengalami Peningkatan yang dari 166 kejadian pada tahun 2021 menjadi 218 kejadian pada tahun 2022 atau Peningkatan mencapai 32%. Dan pada tahun 2023 kejadian 311 dengan peningkatan 61 % pada tahun 2024 terdapat 312 Kejadian faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan disamping factor kondisi alam berupa curah hujan tinggi sehingga menyebabkan jalan yang licin dan sebagian jalan rusak juga, faktor kurangnya banyaknya (PJU) penerangan jalan umum yang mati dan rambu rambu serta banyaknya mobilitas kendaraan yang berimplikasi pada peningkatan Lakalantas pada tahun 2024.

Hal ini juga terjadi dari sisi fatalitas kejadian juga terjadi peningkatan. Tahun 2021 dan 2022 terdapat peningkatan jumlah korban meninggal dunia ataupun luka berat, dari 249 korban pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 249 korban jiwa atau Peningkatan sampai pada angka 8,03%. Dari tingkat fatalitas korban, dari sisi korban meninggal dan luka berat, pada tahun 2022 terjadi Penurunan 16% dari tahun 2021 dan pada tahun 2024 ada peningkatan 43 % dari tahun 2023

Secara keseluruhan korban, tahun 2023 dan 2024 terjadi Peningkatan dari 218 korban menjadi 312 korban atau mencapai 4%. Untuk korban meninggal dunia terjadi Peningkatan dari di tahun 2021 sebanyak 34 orang dan pada tahun 2023 menjadi 93 orang atau 43%.

Luka berat pada tahun 2024 sebanyak 5 orang meninggal Dunia 2 Luka Berat dan 335 Luka Ringan

Chart III.3
Fatalitas Lakalantas Tahun 2019-2024



Korban meninggal dunia terjadi fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami Peningkatan, sedangkan pada 2021 terjadi peningkatan 11,66%. Untuk korban meninggal dan luka berat mengalami penurunan 28,33% pada 2018, dan , pada tahun 2020 mengalami Peningkatan 63,12% pada 2020. Sedangkan luka ringan, terjadi kenaikan dalam kurun waktu 2019-2022. Sedangkan pada tahun 2022 mngalami peningkatan mencapai 8,03% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 43.87% dari tahun 2022 pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 387 korban secara keseluruhan menjadi 389 korban secara keseluruhan

Lakalantas 2024



Target 120 kejadian
Realisasi 312 kejadian
Peningkatan 70%
Kinerja 39%





1

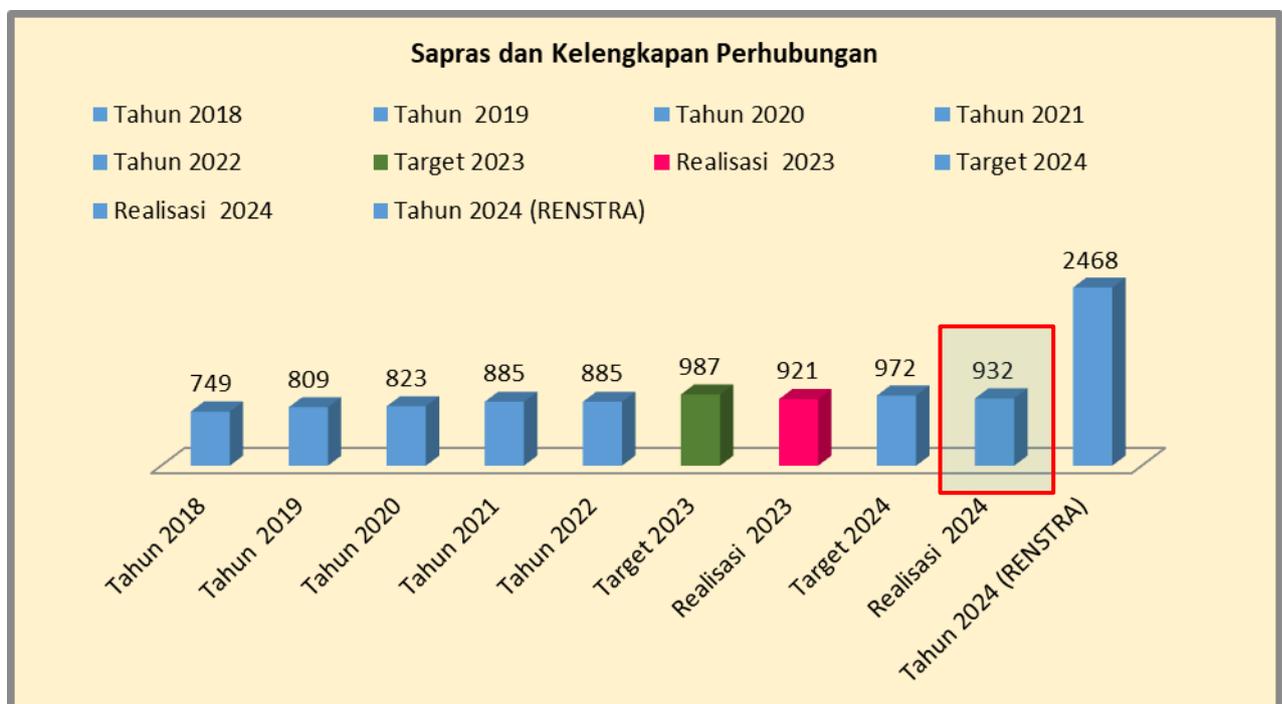
Indikator Program

**Persentase Sarana Prasarana Perhubungan
dalam Kondisi Baik**

Target
96,55%

Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian klerja dari tahun 2018-2024 meningkat, meskipun pada tahun 2024 belum sesuai target. Target kinerja 95.88% dan realisasi 95,88%, dalam artian capaian kinerja mencapai 89.67%. Capaian tahun 2024, bila disandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 37,76%. Hal ini tergambar dalam chart berikut ini :

Chart III.5
Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik
Tahun 2018-2024 dan target akhir Renstra



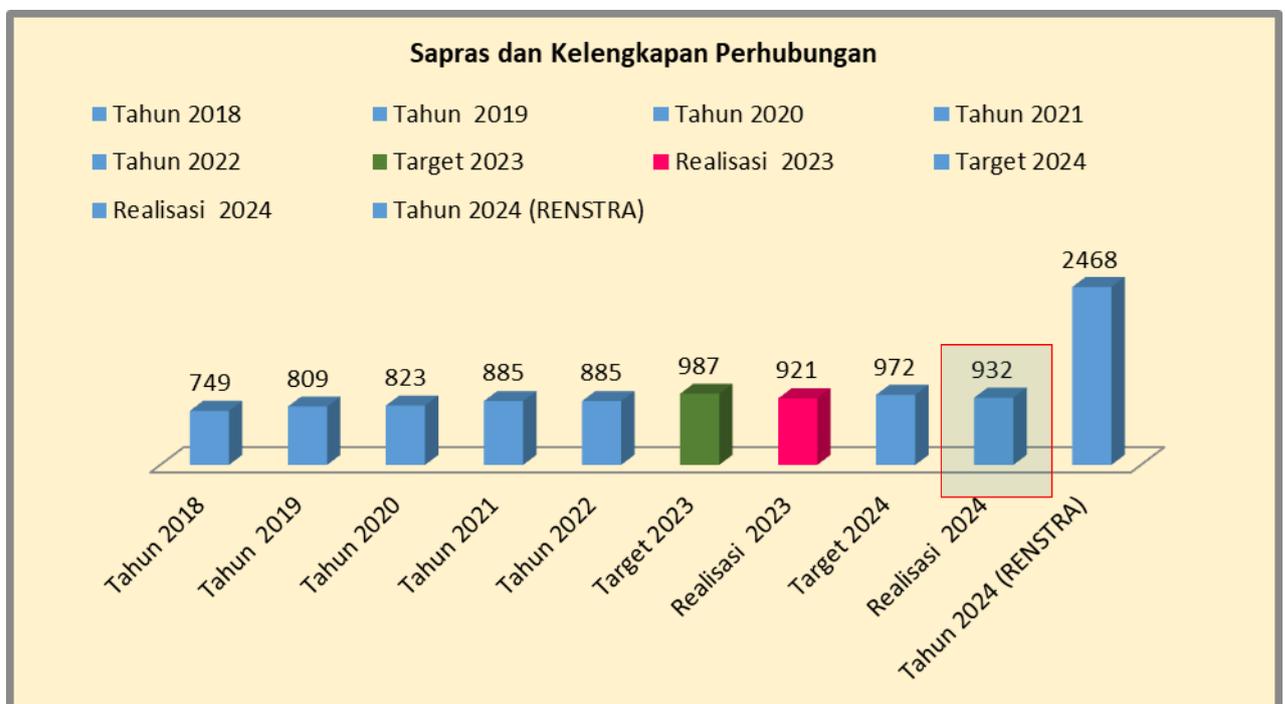
Capaian antara target dan realisasi pada tahun 2024 mengalami mengalami kenaikan persentase dari tahun 2023 di tahun 2024 pengadaan sarana dan prasarana mencapai 95.88 % dari Hal ini di sebabkan pada tahun 2024 pengadaan sarana dan prasarana terdapat

Pemeliharaan Warning 20 Unit dan pemeliharaan PJU 20 Unit di Recofusing sehingga yang tersisa hanya 11 Pemeliharaan Portal

1. Indikator : Jumlah Sarana Prasarana dan Kelengkapan Perhubungan

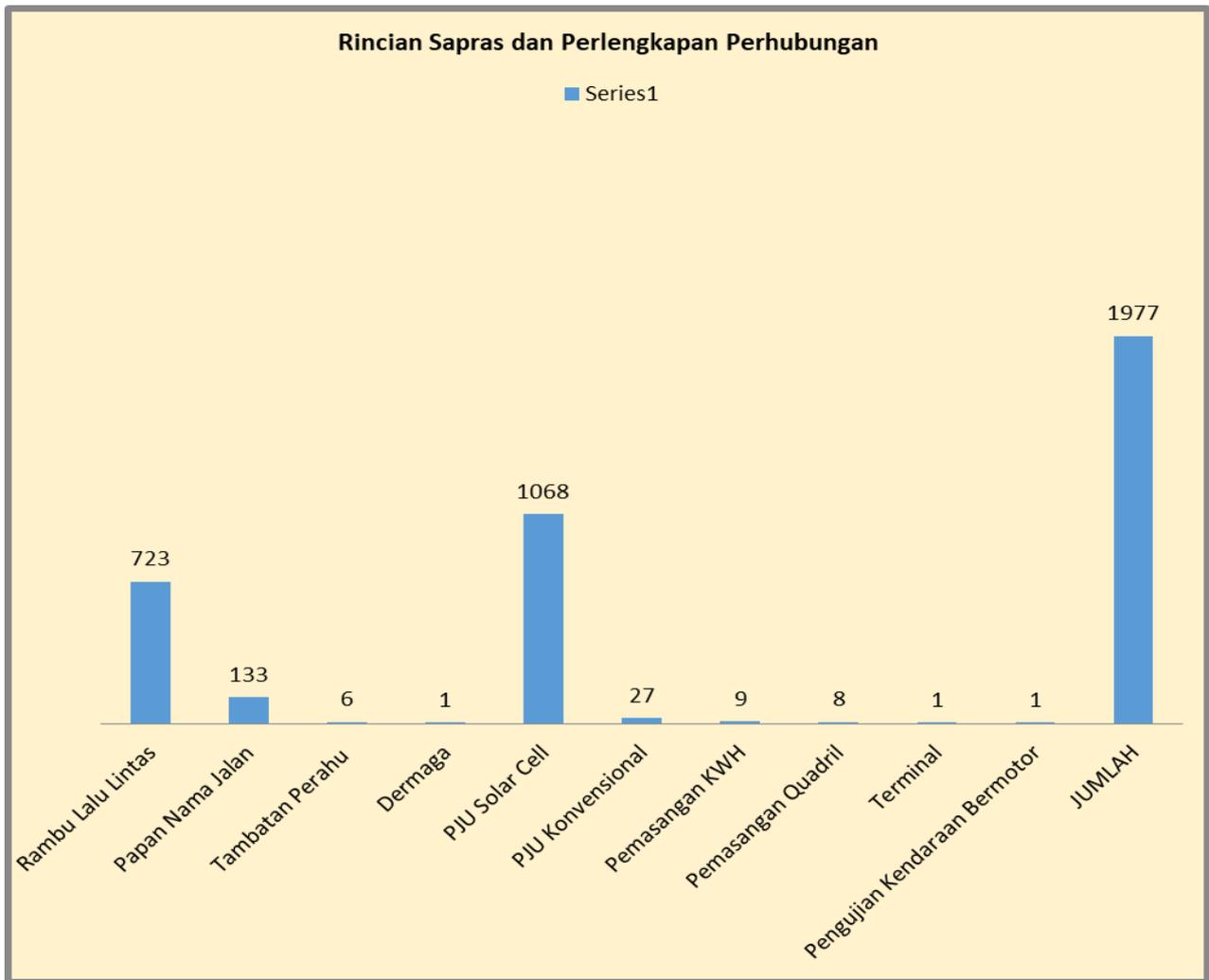
Indikator jumlah sarana prasarana merupakan indikator dari kegiatan Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana perhubungan. Tahun 2024, sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan target berdasarkan Renstra yakni 2468 unit, realisasi 937 unit, jumlah ini mengalami Penurunan khususnya di PJU juga pada tahun 2024 di akibatkan adanya rekofusing anggaran

Chart III.6
Sapras dan Kelengkapan Perhubungan Tahun 2018-2024



Sarana prasarana perhubungan terdiri dari rambu-uji lalu lintas, papan nama jalan, Terminal Tipe C Wonomulyo, Pengujian Kendaraan Bermotor, Tambatan Perahu serta Dermaga Rakyat dan pada tahun 2022 pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan menjadi kewenangan dinas perhubungan yang sebelumnya pada bagian umum sekretariat daerah.

Chart III.7
Sapras dan Kelengkapan Perhubungan Tahun 2024



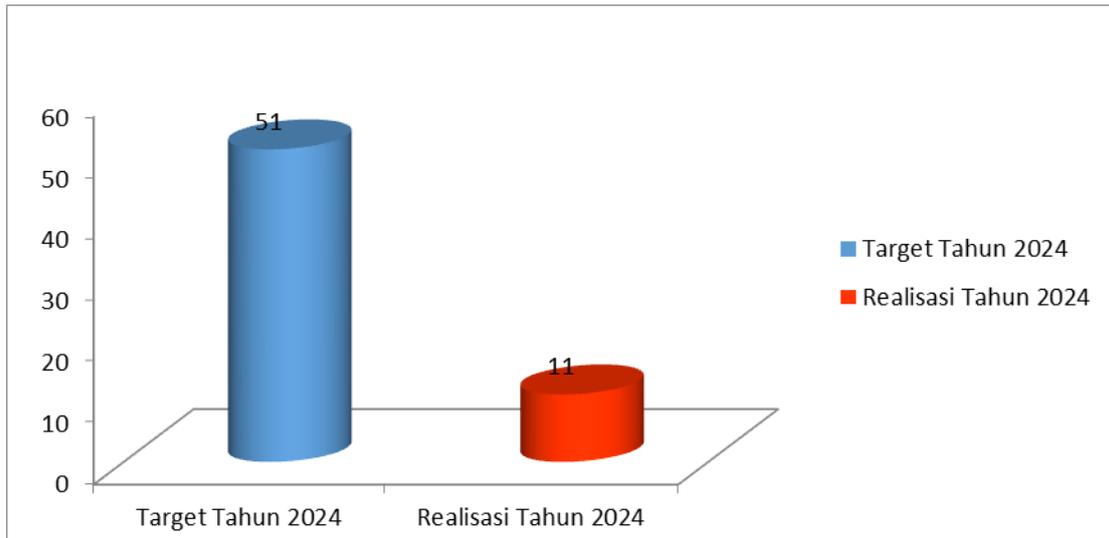
Realisasi kegiatan pada tahun 2024 pada indikator ini pengadaan Sarana dan Prasarana serta kelengkapan perhubungan di fokuskan pengadaan dan pemeliharaan pemeliharaan mengingat banyak fasilitas perhubungan yang sudah mulai rusak dan tidak berfungsi sehingga pada tahun 2024 terdapat pengadaan 20 warning Light dan 20 PJU, 11 portal namun pada tahun 2024 terdapat rekofusing sehingga hanya pemeliharaan portal yang dilakukan pada tahun 2024

2. Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang diperbaiki

Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaiki merupakan indikator dari kegiatan Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan. Sarana prasarana perhubungan yang diperbaiki pada tahun 2024 berupa pemeliharaan Portal maka capaian kinerja sebesar 66%.

Chart III.7
Rehab tahun 2024

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Rp 880,334,362	Rp 103,953,792	Rp 103,840,422	100.00%
Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Rp 880,334,362	Rp 103,953,792	103,840,422	100.00%



Sumber daya, Kendala dan Solusi

Indikator Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan terkait pemenuhan indikator sarana prasarana dalam kondisi baik dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana terpapar dari tabel berikut :

Tabel III.2

Program Kegiatan dan serta Realisasi Anggaran
Indikator Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik Tahun 2024

Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tahun 2024

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari target kinerja sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 95,65% dan terealisasi 349 dalam artian kinerja mencapai 365%. Hal ini disebabkan dari target awal 51 berupa PJU menjadi menjadi 11 hal ini di sebabkan akibat adanya rekofusing anggaran

Kendala dan solusi terkait pemenuhan indikator sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebagai berikut :

KENDALA

- ❑ Kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan yang tidak sebanding dengan alokasi anggaran;
- ❑ Kewenangan penanganan terkait status jalan;
- ❑ Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan;
- ❑ Pemanfaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan masih minim;
- ❑ Belum tersedianya masterplan transportasi;
- ❑ Belum terwujudnya pembangunan Bandara;



Barat dan Kementerian Perhubungan RI terkait pemenuhan sarana prasarana keselamatan jalan;

- ❑ Melakukan sosialisasi dan juga melakukan pemeliharaan sapsras dan perlengkapan perhubungan;
- ❑ Berupaya meningkatkan pemanfaatan terminal dan pengujian kendaraan;
- ❑ Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan sapsras perhubungan;

Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik



Target 95,65%
Realisasi 11
Kinerja 22%





Indikator Program

Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman

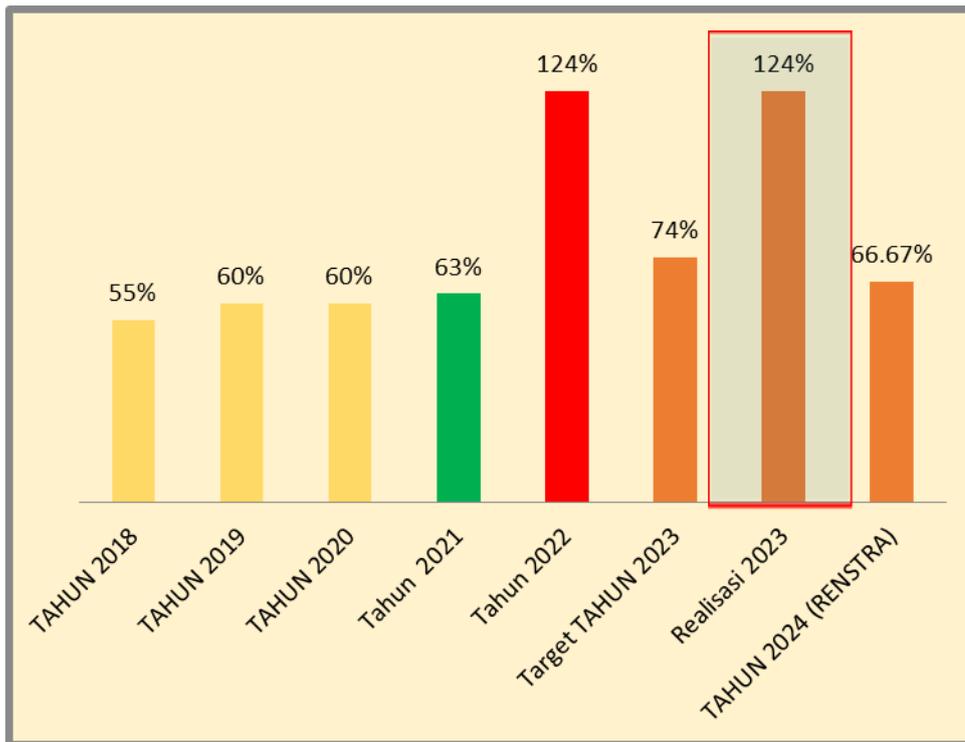
Target

77,14%

Pada Tahun 2024, persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 77.14% dan realisasi 126%.. Bila capaian pada tahun 2024 ini disandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian sudah mencapai 186%.

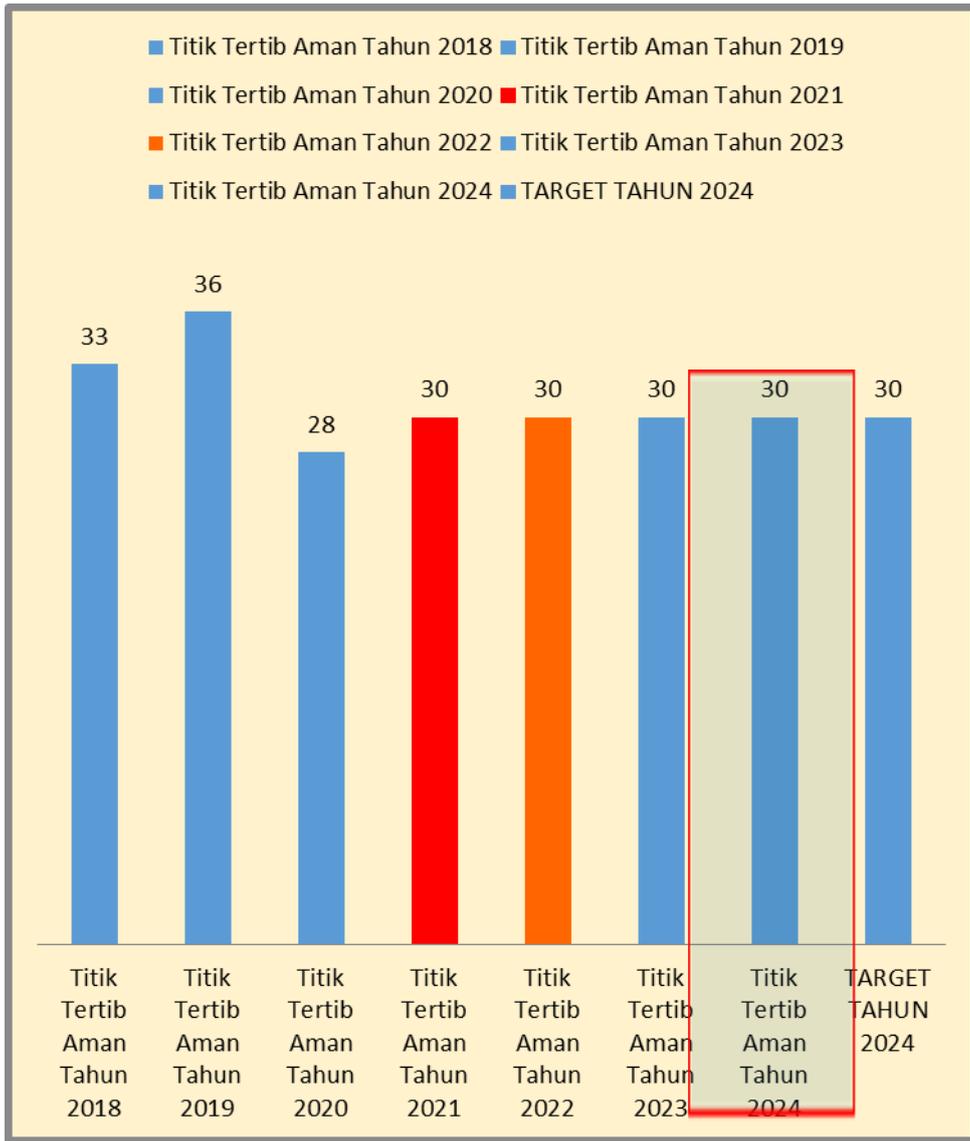
Chart III.8

Persentase Titik Rawan Kecelakaan Tertib dan Aman, Tahun 2018-2024 dan capaian kinerja terhadap target akhir Renstra



Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik. Diantara itu pada tahun 2022 terdapat 42 titik tertib aman dari target 30 titik. Angka ini sama pada tahun 2023 yang sudah 42 titik tertib dan aman dari 60 lokasi titik aman. Defenisi titik lokasi tertib dan aman adalah ketika titik rawan kecelakaan tersebut terpasang rambu-rambu lalu lintas dan atau dilakukan pengamanan oleh petugas lapangan Dinas Perhubungan.

Chart III.9
Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman, Tahun 2017-2024



Tabel III.3

Titik Lokasi Rawan Kecelakaan dan Kepadatan Lalu Lintas Tahun 2024

NO	TITIK LOKASI	Tahun 2024	Ket.
1	Sappoang Binuang		Rambu
2	Kanang Binuang		Rambu
3	Pintu Gerbang Polewali		Rambu
4	Tonyaman Binuang		-
5	Depan Terminal tipalayo		-
6	Pertigaan Salu Mandalan		-
7	Pertigaan Lemo		Rambu
8	Jl. Durian	1	Rambu/PAM
9	SDN 001 Polewali	1	PAM
10	SMPN 1 Polewali	1	PAM
11	SDN 026 Polewali	1	PAM
12	Pertigaan DPRD	1	PAM
13	SMA 1 Polewali	1	PAM
14	TK Pertiwi	1	PAM
15	SDN 066 Polewali	1	PAM
16	SMPN 3	1	PAM
17	SDN 028 Pekkabata	1	PAM
18	Pasar Sentral	1	PAM
19	Perempatan kantor bupati	1	PAM
20	Kejaksaaan	1	PAM
21	SDN 17 manding	1	PAM
22	SDN 020 Rea barat	1	PAM
23	SMPN 1 Wonomulyo	1	PAM
24	Perempatan 4 terminal	1	PAM
25	Perempatan 4 jansen	1	PAM
26	SMPN 5 Wonomulyo	1	PAM
27	Pantai bahari	1	PAM
28	Sport Center	1	PAM
29	Lokasi keg. Insidentil	1	PAM
30	Jembatan Takatidung Perempatan Andi Latanratu-		Rambu
31	Perempatan Andi Latanratu-Sumur Manurung		PAM

32	Perempatan Andi Latanratu-Andi Tomming	1	PAM
33	Perempatan Andi Depu-Andi Tomming	1	PAM
34	Kampung Tangga Matakali/Mts	1	PAM
35	Labasang Matakali		Rambu
36	Pertigaan Lampa Mapilli		Rambu
37	Simpang tiga Jl. ke Tutar		-
38	Pertigaan Pasar Mapilli	1	Rambu
39	Jembatan Campalagian		Rambu
40	Pasar Campalagian	1	Rambu
41	Depan Masjid Lapeo		Rambu
42	Palippis Campalagian		Rambu
43	Pasar Pambusuang		Rambu
44	Simpang empat Lamasariang		-
45	Simpang tiga samping SMA		Rambu
46	Dekat Patung Andi Depu	1	PAM
47	Simpang empat Depan Masjid		Rambu
48	Simpang tiga Pintu Gerbang Kris		-
49	Simpang tiga eks Pasar Ikan	1	Rambu/PAM
50	Simpang Tiga Depan Madrasah		Rambu
51	Simpang tiga jalan Korban 40.000	1	
52	Simpang empat Jl. Basseang		-
53	Samping Polres Polman		Rambu
54	Simpang empat dekat Telkom		Rambu
55	Simpang tiga jl. GI PLN		Rambu
56	Poros Mamasa Simpang tiga		-
57	Simpang tiga kantor kec. Anreapi		-
58	Simpang tiga Papandangan		-
59	Simpang tiga jl. Kunyi		-
60	Poros Mamasa Leppan Anreapi		-
JUMLAH		30	

Pada tahun 2024, disamping kegiatan rutin pengaturan pengamanan lalu lintas, Kegiatan survei titik rawan kecelakaan juga intens dilakukan. Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder, Polres Polewali Mandar dan PU PR atau Jasa Marga. Hal ini dilakukan untuk menemukenali lokasi rawan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Hasil survei akan menjadi rekomendasi tentang keselamatan lalu lintas bagi pihak-pihak terkait.

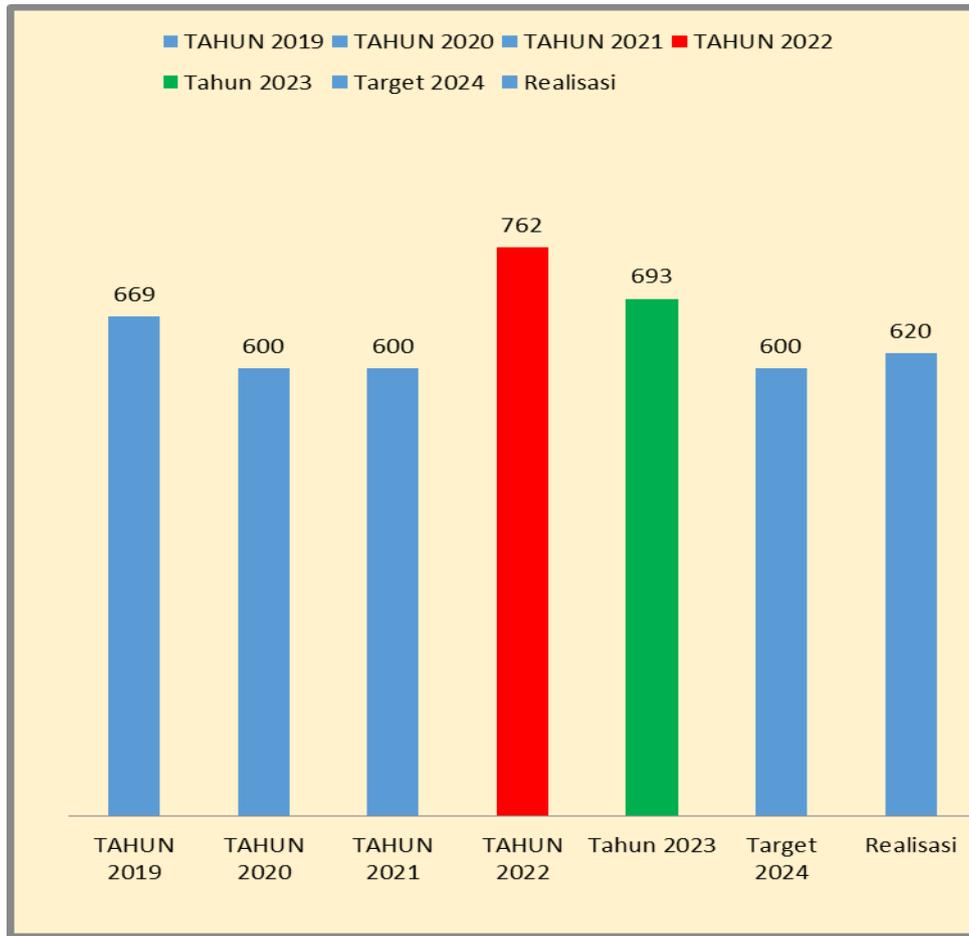


1. Indikator : Jumlah lokasi tertib lalu lintas

Indikator ini ditopang oleh kegiatan Pengaturan dan pengamanan lalu lintas. Pada tahun anggaran 2023, bentuk kegiatan dilakukan dengan pengaturan dan pengamanan titik lokasi rawan kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada 6 lokasi dari target 12 titik lokasi atau 50% lokasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin harian, jadi aktivitas pengaturan pengamanan lalu lintas dilakukan dengan intensitas tinggi. Pada tahun 2023, kegiatan ini dilakukan sebanyak 693 kali dari target 600 kali atau kinerja mencapai 102%.

Chart III.10
 Jumlah Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas, Tahun 2019-2024



beberapa aktifitas pengaturan pengamanan lalu lintas dilakukan di beberapa lokasi seperti di pasar Sentral pasar Petikan pasar Tinambung pasar Wonomulyo, Kegiatan pengamanan juga dilakukan bersama Polres Polman melalui operasi terpadu perayaan even yang berlokasi di Sport center yang biasa merupakan pusat even berbagai kegiatan,.

Tabel III.4
 Jumlah Kegiatan Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas Tahun 2024

No	Bulan	Data Lalu Lintas 2024														Ket
		Jumlah Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8						

		n	Pengaman Titik- Titik Kemacetan	Jumlah	Car Free Day	Jumlah	Pengamanan Pasar	Jumlah	Hari Besar	Jumlah	Insedenti l	Jumlah	Event	Jumlah	Ke ag a m a a n	Jumlah	Pengawal an	Jumlah			
1	Januari	62					-PAM Pasar Sentral	8			-PAM Jalan Santai HAB ke-76,Tgl.02	1					- Pengawalan Jalan Santai HAB Ke-76 Tahun 2022	1			
							-PAM Pasar Campalagian	8				-PAM Pelantikan Kepala Desa Terpilih,Tgl.04	1					- Pengawalan Nikah Anak Hj.A.Nursami Masdar	1		
							-PAM Pasar Tinambung	9				-PAM Pengantian Anak Hj.Andi Nursami Masdar,S E,M.Adm. KP,Tgl.15 s/d 16	2								
							-PAM Pasar Pelitakan	8													
							-PAM Pasar wono	9													
							- PAM Depan Sekolah	9													
						-PAM Car Free Day	5														
						JUMLAH	0	JUMLAH	5	JUMLAH	51	JUMLAH	0	JUMLAH	4	JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	2
2	Februari	52	- PAM depan Sekolah Tgl, 4,8,11,15,18,22,25	7			-PAM Pasar Sentral	8			- PAM di Galung Lombok Tgl 2	1									
							-PAM Pasar Campalagian	8				- PAM Pacuan Kuda Tgl. 19	1								
							-PAM Pasar Tinambung	8													
							-PAM Pasar Pelitakan	7													
							-PAM Pasar wono	8													
						-PAM Car Free Day	4														
						JUMLAH	7		4		39		0		2		0		0		0
3	Maret	67	PAM Apel di Kantor Daerah tgl 7,21,28	3			-PAM Pasar Sentral	9			PAM Apel Koordinasi Tgl 17	1			- PAM Pembukaan & Penutupan	2					

			JUMLAH	1		2		44		0		2		1		1	
			- PAM Depan Sekolah	9			-PAM Pasar Sentral	9			-PAM Pertandingan Domino TGL.02 s/d 03	2		- PAM Idul Adha 14 43 H, Tgl 10	1		
			PAM Apel di Kantor Daerah tgl 04,11,18, 25	4			-PAM Pasar Campalagian	8			-Pam Penyekatan Penyakit Kuku dan Mulut Tgl.8 s/d 14 dan 14 s/d 21	14					
							-PAM Pasar Tinambung	9									
							-PAM Pasar Pelitakan	8									
							- PAM Pasar wono	8									
					-PAM Car Free Day	5											
			JUMLAH	13		5		42		0		16		1		0	
7	Jul i	77															
			- PAM Depan Sekolah	9			-PAM Pasar Sentral	9		- Hari Kemerdekaan RI Ke 77	1		- PAM sandeq race tgl 28 s/d 31	4	- PAM Penjemputan haji kloter 13 tgl 08	1	-PAM Pengawalan Haji Kloter 13 Tgl 09
			PAM Apel di Kantor Daerah tgl 01,08,15, 22,29	5			-PAM Pasar Campalagian	9				- PAM Renuhan Suci Tgl 16 Agustus	1				
							-PAM Pasar Tinambung	9									
							-PAM Pasar Pelitakan	9									
							- PAM Pasar wono	10									
					-PAM Car Free Day	4	- PAM Depan Sekolah	9									
8	Agus tus	63															

ve m be r	PAM Apel di Kantor Daerah tgl 07, 14, 21, 28	4		-PAM Pasar Campalagian	8	Hari Pahlawan 10 Nove mber	1	HUT Kopri ke-51 tgl 29 Novembe r	1									
				-PAM Pasar Tinambung	9			PAM mappatu ada' di kediaman Sukirman Saleh SH.MM TGL 07 Novembe r	1									
				-PAM Pasar Pelitakan	8													
				-PAM Pasar wono	9													
			-PAM Car Free Day	4	- PAM Depan Sekolah	9												
	JUMLAH	4	JUMLAH	4	JUMLAH	52	JUMLAH	1	JUMLAH	2	JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	0		
De se m be r				-PAM Pasar Sentral	9													
	PAM Apel di Kantor Daerah tgl 05, 12, 19, 26	4		-PAM Pasar Campalagian	9	PAM UItah POLMAN Ke-63 tgl 29	1	PAM Nataru tgl 26 Desember 2022 - 02 Januari 2023	8	PAM Pam eran Expo di Sport Center 26 s/d 31	6							
				-PAM Pasar Tinambung	9				APEL Gelar Pasukan Pergantian tahun di polres tgl 31 Desember	1								
				-PAM Pasar Pelitakan	8													
				-PAM Pasar wono	8													
			-PAM Car Free Day	4	- PAM Depan Sekolah	9												
	JUMLAH	4	JUMLAH	4	JUMLAH	52	JUMLAH	1	JUMLAH	9	JUMLAH	6	JUMLAH	0	JUMLAH	0		
Jumlah Total	693																	

Beberapa lokasi titik rawan belum dilakukan pengaturan pengamanan lalu lintas juga dikarenakan keterbatasan jumlah personil petugas lapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk lebih mengefektifkan pengaturan pengamanan lalu lintas, juga dalam beberapa momen tertentu dilakukan rekayasa lalu lintas. Hal ini biasa dilakukan dalam even-even besar tingkat kabupaten yang melibatkan keramaian dan penumpukan kendaraan.



Selain pengaturan pengamanan, juga dilakukan identifikasi titik-titik rawan kecelakaan yang aman dengan indikator terpasangnya rambu-rambu lalu lintas keselamatan jalan pada titik tersebut.

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas dijadikan ukuran, karena tidak semua titik rawan kecelakaan bisa dijangkau dengan intensitas pengamanan personil lapangan, jadi dengan adanya rambu-rambu lalu lintas diharapkan dapat memberikan peringatan atau petunjuk kepada pengguna jalan terkait ketertiban dan keselamatan mereka.



2. Indikator : Titik Lokasi Parkir yang Tertib

Titik lokasi parkir yang tertib didasarkan pada indikator bahwa lokasi parkir telah dipasang rambu parkir dan atau fasilitas parkir. Data pada tahun 2023, ada penambahan titik parkir 11 titik lokasi parkir dengan 11 lokasi tertib, ada 6 belum tertib

Pada tahun 2024, 11 lokasi tertib dari 17 titik lokasi dari target 9 lokasi atau 78%, Asumsi tertib ketika terdapat rambu parkir dan atau terdapat petugas parkir. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan, bertambahnya pusat keramaian dan juga kapasitas petugas parkir.

Chart III.11
Ketertiban Titik Lokasi Parkir, Tahun 2018-2024



Terkait sumber daya perparkiran, maka beberapa lokasi parkir dialihkan pengelolaan pada pihak ketiga. Diantara lokasi tersebut adalah lokasi parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar, dan Pasar Wonomulyo dan beberapa Lokasi parkir masih proses lelang pengelolaan adalah lokasi parkir Pasar Sentral Pekkabata, Pasar Baru Polewali. Dalam konteks ini, namun ada lokasi penambahn titik parkir pasar matakalii , pasar kanusuang pengelolaan perparkiran pada unit kerja Dinas Perhubungan pada pemantauan dan pengawasan lokasi.

Tabel III.5
Titik Lokasi Parkir Tertib Tahun 2024

NO	Lokasi parkir	Kecamatan	Jenis		Keterangan	Persentase
			Area tepi Jalan	Area parkir khusus		
1	Pantai Bahari	Polewali	√		Tertib	65%
2	Pasar Polewali	Polewali	√		Tertib	
3	Kantor Samsat	Polewali		√	belum tertib	
4	Kantor Capil	Polewali		√	Tertib	
5	Pasar Sentral	Polewali	√		Tertib	
6	Rumah Sakit	Polewali		√	Tertib	
7	Pasar Pelitakan	Pelitakan	√		belum tertib	
8	Pasar Wonomulyo	Wonomulyo	√		Tertib	
9	Pasar Luyo	Luyo	√		belum tertib	
10	Pasar Tinambung	Tinambung	√		belum tertib	
11	Kantor Lapas	Polewali		√	belum tertib	
12	Alun- Alun Polewali	Polewali	√		Tertib	
13	Puskesmas Wono	Wonomulyo	√		Tertib	
14	Pasar Malam Tinambung	Tinambung	√		belum tertib	
15	Pasar Mapilli	Mapilli	√		Tertib	
16	Pasar Kanusuang	Mapilli	√		Tertib	
17	Pasar Matakali	Matakali			Tertib	

Meskipun kinerja cukup tinggi, tetapi terkait parkir ada beberapa faktor yang tidak bisa dipisahkan. Asumsi bahwa parkir sangat terkait erat dengan pelayanan dan keamanan kendaraan merupakan diantara beberapa asumsi yang berkembang. Padahal kalau kita bicara perparkiran, sandaran hukumnya tetap pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi ukuran kinerjanya tetap pada teraturnya kendaraan demi lalu lintas angkutan jalan yang tertib dan aman.

Sumber daya, Kendala dan Solusi

Indikator Titik Rawan Kecelakaan dan Kepadatan Tertib Aman

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6

PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN 2024

INDIKATOR PERSENTASE TITIK RAWAN KECELAKAAN YANG TERTIB DAN AMAN

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	10.013.375	10.013.375	10.013.375	100%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.245.111	2.245.111	2.245.111	100.00%
Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyarat dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	2.245.111	2.245.111	2.245.111	100.00%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target kinerja 74,43 % dan realisasi 100%, artinya capaian kinerja Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman mencapai 100%. Dari sisi realisasi Anggaran terealisasi 100.00% dari

Kendala dan solusi terkait indikator titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman seperti tertera di bawah ini :

KENDALA

- ❑ Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar, sangat terkait banyak faktor terutama Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kinerja pemenuhan PJU ini tidak berada dalam wilayah kerja Dinas Perhubungan;
- ❑ Banyak titik rawan kecelakaan yang berada jauh dari pusat kota, sehingga menyulitkan untuk penertiban lalu lintas;
- ❑ Masih seringnya kendaraan parkir di badan jalan, sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan dan mengganggu arus lalu lintas;
- ❑ Kuantitas dan kualitas Petugas lapangan yang masih terbatas dan termasuk



kualitas rambu-rambu lalu lintas sebagai sarana keselamatan jalan;

- ❑ Melakukan rekayasa lalu lintas dan komunikasi dengan Satlantas Polres Polewali Mandar terkait penertiban arus lalu lintas;
- ❑ Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan Nasional, dan melakukan kajian terkait upaya pemasangan teknologi pengawasan arus lalu lintas / CCTV;
- ❑ Menekankan kedisiplinan tugas lapangan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas lapangan Dinas Perhubungan.

Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman



Target 74,43%
Realisasi 100%
Kinerja 100%





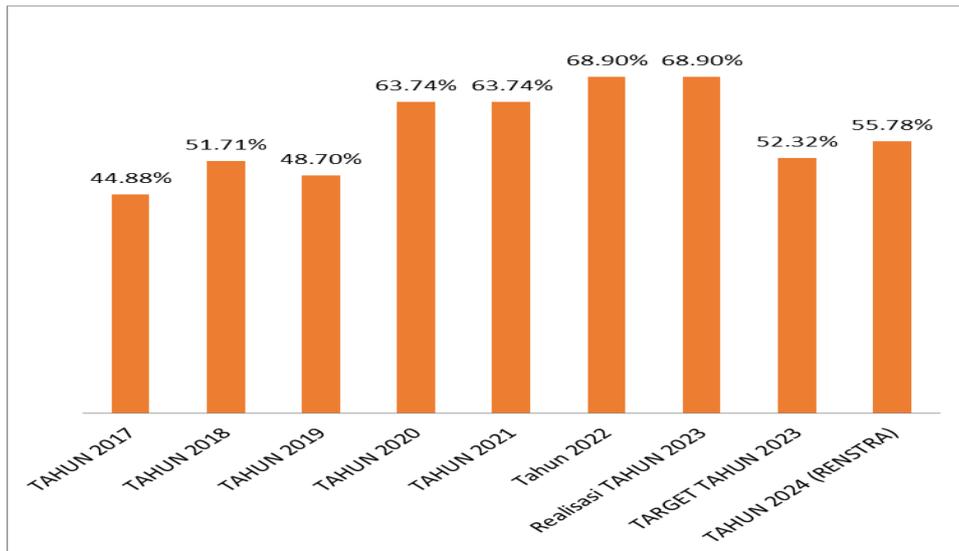
Indikator Program

Persentase Angkutan Umum yang Sesuai Standar Keselamatan

Target
54,45%

Chart III.12

Angkutan umum yang Sesuai Standar Keselamatan, Tahun 2018-2024
dan capaian kinerja terhadap akhir tahun Renstra



Pada tahun 2024, persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 54.45% realisasi 68,90% capaian kinerja 123%. Hal ini diperoleh dari realisasi uji KIR 58.33% dan pelayanan angkutan melalui kendaraan dan penumpang keluar-masuk terminal Wonomulyo sebesar 20286. Capaian kinerja dasar 126 % Capaian tahun 2023 mencapai 68,90 % bila disandingkan dengan target akhir tahun Renstra pada 2024.

Selisih angka dari target yang ditetapkan dan penurunan persentase realisasi pada tahun 2023 disebabkan karena adanya kenaikan Tarif angkutan dan pengujian kendaraan bermotor tidak beroperasi sehubungan keterlambatan kartu uji KIR.

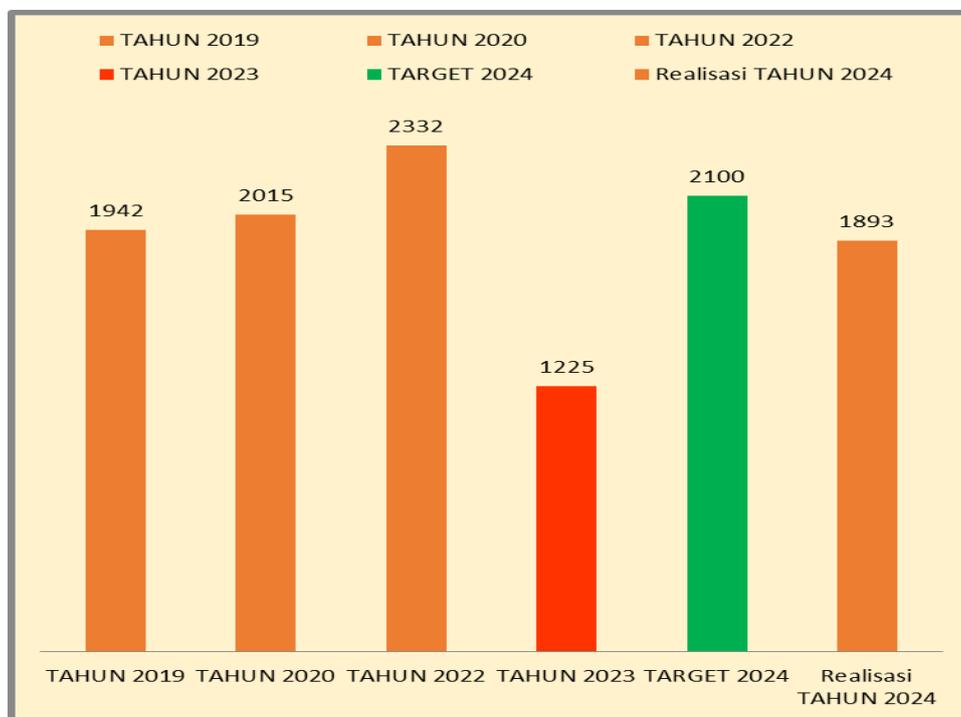
Angkutan umum yang sesuai standar keselamatan diukur berdasarkan kendaraan yang telah lulus uji KIR dan tingkat pelayanan angkutan. Hal ini didasarkan pada bahwa ketika kendaraan telah lulus uji KIR berarti secara fisik kendaraan sudah memenuhi standar kelaikan jalan, karena telah melewati serangkaian uji pada beberapa bagian kendaraan seperti rem, lampu, kaca dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat pelayanan angkutan, bahwa kendaraan akan beroperasi keluar-masuk terminal ketika standar kelaikan terpenuhi dan juga beberapa fasilitas terkait kenyamanan dan keamanan penumpang bisa mereka lengkapi.

Fluktuasi realisasi standar keselamatan angkutan umum dikarenakan terjadi pula ketidakstabilan kendaraan wajib uji dan rasio antara angkutan dan penumpang yang keluar-masuk terminal. Operasional kendaraan pribadi sebagai angkutan umum dan banyak kendaraan numpang uji merupakan diantara faktor fluktuasi angka realisasi indikator.

1. Indikator : Jumlah Kendaraan Uji KIR

Pada tahun 2024, realisasi kendaraan yang melakukan uji KIR mencapai 25.55% dari target 68.61%. Dengan begitu berarti capaian kinerja jumlah kendaraan uji KIR di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Polewali Mandar pada tahun 2024 yaitu 49%.

chart III.13
Kendaraan Uji KIR, Tahun 2018-2024



Menghitung capaian realisasi kinerja kendaraan uji KIR didasarkan pada jumlah kendaraan uji KIR dibagi kendaraan wajib uji. Untuk tahun 2024, kendaraan wajib uji sama dengan pada tahun 2024 naik yakni 3571 unit.

Sederhananya, pada tahun 2024, kendaraan yang melakukan uji KIR 1893 dengan kendaraan wajib uji 3571 berarti persentasenya 44,30%. Angka ini sebenarnya turun dibanding tahun 2023 yang realisasi kendaraan uji KIR 1225 unit dengan kendaraan wajib uji 2100 yang persentasenya 58%. Proyeksi tahun 2023 ini didasarkan pada data capaian 2023,

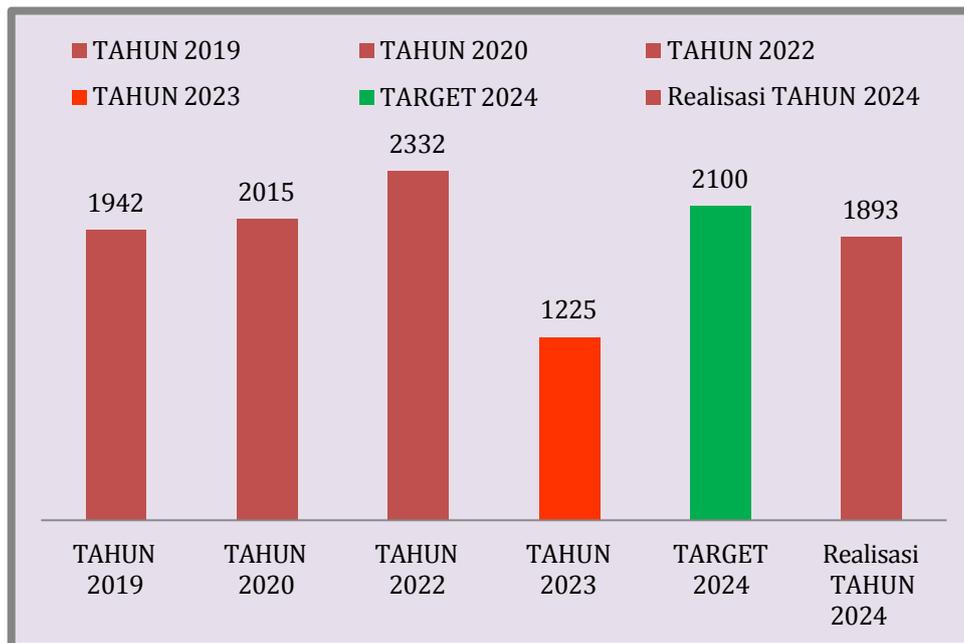
kinerja pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar prospektif dari tahun ke tahun mengalami Penurunan, seperti pada data berikut ini :

Tabel III.7
Kendaraan Laik Jalan 2019-2024

KENDARAAN LAIK JALAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Kendaraan Uji KIR	2332	2308	2878	1689	1225	1893
Kendaraan Wajib Uji	4757	4757	4745	3571	3571	3571
PERSENTASE	49.02%	48.52%	60.65%	47.30%	34.30%	53.01%

Tabel di atas menunjukkan bagaimana perbandingan antara kendaraan yang diuji dengan kendaraan wajib uji. Setiap tahun terus mengalami lonjakan persentase,. Detail jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR pada tahun 2024 sebagaimana chart di bawah ini :

Chart III.14
Kendaraan Uji KIR, Tahun 2017-2024



Tabel III.8

DAFTAR JUMLAH KENDARAAN DI UJI DALAM TAHUN 2024

NO	BULAN	JENIS KENDARAAN										JLM KEND	KET	
		MOBIL BUS			MOBIL BARANG									
		MPU	BESAR	SEDANG	KECIL	TRUCK 6 RODA KEATAS	TRUCK 6 RODA	TRUCK 4 RODA	PICK UP	KEND. RODA 3	KEND. KHUSUS			GANDENGAN/ TEMPELAN
1	JANUARI		2	2	3	4	38		152				201	
2	FEBRUARI		2	1				33		135			171	
3	MARET					2	21		116				139	
4	APRIL					3	33		94				130	
5	MEI				2	4	34	1	138				179	
6	JUNI				1	1	39		139				180	
7	JULI				1	6	32		151				190	
8	AGUSTUS			1	1	1	35	2	120				160	
9	SEPTEMBER					2	39		72				113	
10	OKTOBER			1	7	1	21		87				117	
11	NOVEMBER		3	1	3	3	19		116				145	
12	DESEMBER		1	6	1	2	24	2	132				168	
	JUMLAH	0	8	12	19	29	368	5	1452				1893	

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR adalah mobil Pick-Up dan disusul jenis-jenis mobil yang lain. Kendaraan roda tiga yang dimaksud di atas bukanlah Bentor, melainkan kendaraan roda tiga yang lain seperti motor pengangkut sampah.

Pada tahun 2024, rata-rata Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar, menguji antara 2- 3 unit kendaraan dengan rasio pembagi 235 hari kerja dalam setahun.

Dalam proses peningkatan pelayanan dan demi standar kualitas dan akurasi alat uji, maka Kementerian Perhubungan RI telah mensyaratkan bahwa setiap Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melakukan kalibrasi alat uji dan uji sertifikasi. Terkait kalibrasi dan pelayanan serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2023, juga sudah dilakukan pemeliharaan beberapa alat uji.

Sejak tahun 2021 sampai Tahun 2024 , pengujian kendaraan bermotor Polewali Mandar merupakan satu-satunya pengujian kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Barat yang terakreditasi. Dalam artian, hanya Pengujian kendaraan Polewali Mandar yang boleh melakukan uji kendaraan di Provinsi Sulawesi Barat.



(19/08/2020) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polman menerima kunjungan Dinas Perhubungan Provinsi di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor



@dishubpolman



dishub polewali mandar



http://dishub.polmankab.go.id



Dishub Polman Keren

Sertifikat Nomor : 413/SM.304/DRJD/2020



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**SERTIFIKAT AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1433/AJ.502/DRJD/2020 tanggal 16 Maret 2020 menyatakan bahwa :

Nama UPUBKB : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 Alamat : Kompleks Terminal Titalayo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar

Terakreditasi dengan klasifikasi :

AKREDITASI B (Bersyarat)

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal **16 Maret 2020** sampai dengan **16 Maret 2022**.

Jakarta, 27 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
NRP. 6205 0784

Setelah Kalibrasi dilakukan pada tiap tahun, , Pengujian Kendaraan Kabupaten Polewali Mandar telah terakreditasi B (Bersyarat) dengan beberapa peralatan yang mesti diupgrade kapasitasnya. Terkait hal tersebut, tim Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar telah mengupayakan berbagai kekurangan dokumen dan persyaratan lain dan hingga kini, tinggal menunggu hasil verifikasi dari pihak Kementerian Perhubungan RI.

Terkait Kalibrasi dan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor

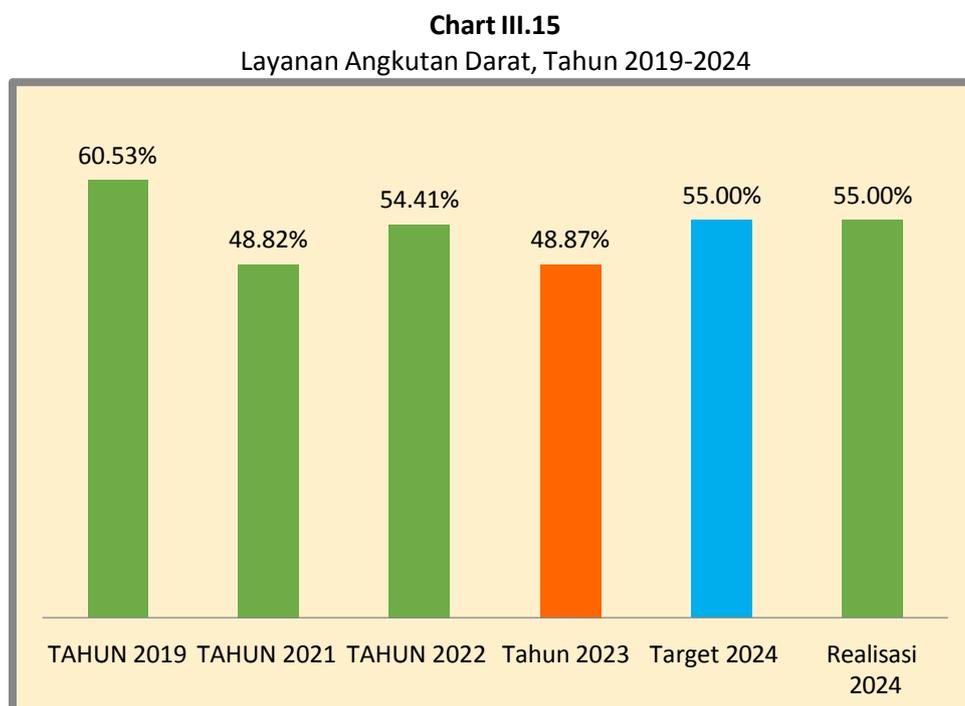
SE.1/AJ.502/DRJD/2019 bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memiliki penetapan akreditasi dari Dirjen Perhubungan Darat dan belum menetapkan Buku Lulus Uji Elektronik (BLUe) sampai dengan batas waktu 31 Desember 2019, maka Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut dilarang untuk menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Terkait hal tersebut, maka pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Polewali Mandar telah menggunakan Blue berupa kartu sebagai bukti lulus uji.

Di Provinsi Sulawesi Barat, hanya pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Polewali Mandar yang telah kalibrasi dan mengajukan akreditasi, maka ke depan peluang untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang uji berkala di Kabupaten Polewali Mandar menjadi terbuka lebar.

2. Indikator : Jumlah Angkutan dan Penumpang yang Keluar-Masuk Terminal

Berdasarkan kewenangan, Kabupaten Polewali Mandar mengelola Terminal Tipe C, yakni Terminal Wonomulyo. Indikator pelayanan angkutan juga berdasar pada jumlah angkutan dan penumpang yang keluar-masuk terminal. Pada tahun 2022, target 59,52% dari 12.000 unit angkutan dan 20.500 orang penumpang yang keluar-masuk terminal dan terealisasi 59,99%, artinya kinerja mencapai 166%.

Angka ini naik dibanding capaian persentase pada tahun 2021 yang mencapai angka 46.99%. seiring dengan berpengaruh besar terhadap pemanfaatan angkutan umum pedesaan maupun terminal di Wonomulyo.



Dari segi pengguna jumlah angkutan dan penumpang justru meningkat. Fasilitas terminal yang menua dan juga keberadaan terminal liar merupakan diantara problem pemanfaatan terminal tipe C Wonomulyo yang belum begitu optimal. Hal lain tentu, sebagai alat transportasi utama masyarakat Polewali Mandar.

Tabel III.9
Layanan Angkutan Darat Tahun 2018-2024

LAYANAN ANGKUTAN DARAT	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Angkutan keluar-masuk terminal	8169	6010	28208	35942	27332
Penumpang keluar-masuk terminal	13496	12310	51848	73541	35673
Rasio : Penumpang/Angkutan	1.7	2.0	1.8	2.0	1.3
PERSENTASE	60.53%	48.82%	54.41%	48.87%	76.62%

Dari tabel di atas, rasio layanan angkutan umum pada tahun 2024 yakni 1.3, menurun dibanding pada tahun 2023 yang hanya 2.0. Rasio ini dimaknai sebagai keterpenuhan angkutan oleh penumpang.

Tabel III.10
Angkutan dan Penumpang Keluar-Masuk Terminal Wonomulyo Tahun 2024

URAIAN	SATUAN	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
Terminal Wonomulyo														
Angkutan Darat	Unit													
Masuk		261	330	272	236	773	1210	1130	1290	1159	1109	1239	1134	10143
Keluar		261	330	272	236	773	1210	1130	1290	1159	1109	1239	1134	10143
Jumlah		522	660	544	472	1546	2420	2260	2580	2318	2218	2478	2268	20286
Penumpang	Orang													
Masuk		367	645	416	332	1176	2056	1795	2085	1894	1812	2257	2147	16982
Keluar		355	635	407	330	1170	2041	1780	2075	1874	1800	2240	2127	16834
Jumlah		722	1280	823	662	2346	4097	3575	4160	3768	3612	4497	4274	33816
Rasio		1,38	1,93	1,51	1,40	1,51	1,69	1,58	1,61	1,63	1,63	1,81	1,88	1,67

Dari tabel tersebut dapat dicermati bahwa rasio tertinggi layanan angkutan darat terjadi pada bulan Januari yakni 2,74 dan terendah pada bulan April dengan rasio 1,51. Secara keseluruhan rasio penumpang dari setiap angkutan selama tahun 2023 adalah 2 sampai 3 orang penumpang.

Rasio layanan angkutan darat dapat dibaca bahwa rata-rata angkutan darat terutama angkutan pedesaan dan perkotaan yang keluar-masuk di Terminal Wonomulyo hanya memuat 1 atau 2 penumpang. Ini disebabkan karena meningkatnya pemanfaatan kendaraan pribadi di Kabupaten Polewali Mandar, terutama kendaraan roda dua/motor. Keberadaan Bentor yang semakin efektif melayani masyarakat, juga menjadi salah satu penyebab meskipun secara standar keselamatan sangat minim. Belum lagi mulai berkembangnya jasa transportasi berbasis aplikasi, ini memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap pemanfaatan Terminal tipe C Wonomulyo.

pada tahun 2024, mobilitas orang dan angkutan, mulai menunjukkan kenaikan jumlah penumpang terhadap pemanfaatan terminal, tak terkecuali terminal tipe C Wonomulyo.



3. Indikator : Jaringan Trayek Efektif

Trayek merupakan diantara hal tak terpisahkan dari keberadaan angkutan umum. Rute ini menjadi salah satu indikator bagaimana manajemen angkutan sesuai standar keselamatan angkutan publik dikelola dan ditata dengan terencana. Jumlah penumpang dan keberadaan kendaraan pribadi merupakan tantangan tersendiri dari operasional trayek

angkutan dan jumlah angkutan sendiri. Fenomena angkutan umum berbasis aplikasi juga menjadi sesuatu tak terbantahkan dari perkembangan dan dinamika dunia transportasi.

Meskipun begitu, keberadaan angkutan pedesaan merupakan fakta yang mesti dikelola operasionalnya. Diantara gempuran tantangan yang tersebut di atas, keberadaan angkutan umum di Kabupaten Polewali Mandar juga memberikan kontribusi optimal bagi mobilitas orang dan barang, diantara salah satunya adalah dengan menata dan mengefektifkan jaringan trayek.

Terdapat beberapa jaringan trayek efektif di Kabupaten Polewali Mandar yakni yang berada di Jalan Poros Nasional. Hal ini dikarenakan akses jalan dan jumlah penumpang yang lebih potensial di jalan poros. Sementara trayek yang berada di pedesaan keberadaannya insidental sesuai keperluan penumpang maupun kepentingan angkutan terkait. Meskipun begitu, penataan tetap penting dilakukan untuk memberikan identitas rute angkutan umum di Polewali Mandar.



Tahun 2022, terdapat tiga (3) trayek angkutan umum di Polewali Mandar yang ditertibkan yakni, trayek Polewali – Wonomulyo, Wonomulyo – Tinambung dan Wonomulyo – Tapango. Di antara ketiga trayek tersebut terdapat 298 unit angkutan umum pedesaan yang menjadi sasaran kegiatan. Kegiatan ini sesuai dengan target yakni tiga (3) trayek tertib dari

target 300 unit angkutan umum, dilakukan penertiban 298 unit tertib penggunaan trayek di dalam artian capaian kinerja mencapai 98%. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penertiban.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga standar keselamatan dari pelayanan angkutan. Kejelasan trayek akan memberikan jaminan bagi penumpang akan ketersampaian tujuan dan juga identitas khusus bagi angkutan umum menempuh rute serta jaminan aksesibilitas angkutan bagi mobilitas orang dan barang di Kabupaten Polewali Mandar.

4. Indikator : Angkutan Umum yang ditertibkan

Konsep awal kegiatan ini adalah penertiban operasional di jalan raya dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen KIR dan trayek. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan tertib dokumen resmi operasional kendaraan.

Target kegiatan pada tahun 2024 ini jumlah kendaraan yang melakukan uji Kir 1893 dari target 2100 hanya sekitar 58.33 persen

Tabel III.11
Realisasi Anggaran
Indikator Persentase Angkutan Umum yang Sesuai Standar Keselamatan Tahun 2024

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	6,538,830	6,538,830	6,533,500	100%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	88,018,088	88,018,088	81,599,208	92.71%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19,116,320	19,116,320	14,016,230	94%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68,901,768	68,901,768	67,582,978	98%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2,245,111.00	2,245,111	2,245,111	99%
Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	2,245,111.00	2,245,111	2,245,111	99%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,013,375.00	10,013,375	10,013,375	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10,013,375.00	10,013,375	10,013,375	100%
Total	106,815,404.00	106,815,404.00	100,391,194.00	100%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator kinerja angkutan umum yang sesuai standar keselamatan pada tahun 2024, terlihat pada gambaran di bawah ini :

KENDALA

- ❑ Tumbuhnya kendaraan pribadi sebagai angkutan umum, termasuk Bentor;
- ❑ Lemahnya kesadaran pengguna kendaraan atau pengusaha angkutan untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagai sarana mengukur tingkat standar keselamatan kendaraanya;
- ❑ Minimnya pemanfaatan terminal oleh angkutan umum dan penumpang, ini terkait dengan fasilitas yang masih minim, sehingga mirip sebagai terminal lintasan;
- ❑ Kapasitas Petugas lapangan Dinas Perhubungan yang masih terbatas dan termasuk status petugas lapangan yang PTT.



selain terus melakukan pembenahan sarana prasarana terkait alat uji, disamping melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap pengguna jalan terkait keselamatan berlalu lintas;

- ❑ Menekankan kedisiplinan tugas lapangan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas lapangan Dinas Perhubungan
- ❑ Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap angkutan umum serta koordinasi dengan Polsek Wonomulyo dan Babinsa terkait pemanfaatan Terminal Wonomulyo;

**Persentase Angkutan Umum yang Sesuai
Standar Keselamatan**



Target 54,32%
Realisasi 73%
Kinerja 181.15%



SASARAN 2

**Meningkatnya Kualitas
Manajemen Perkantoran**

Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target

BAIK

Pelayanan Dinas Perhubungan bertumpu pada beberapa unit kerja; perparkiran, pelayanan terminal, pengujian kendaraan bermotor. Meskipun begitu, terdapat pula pelayanan yang bersentuhan langsung manajemen perkantoran Dinas. Untuk melihat kualitas manajemen perkantoran dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Jumlah responden berdasarkan hasil kuisisioner sebanyak 150 orang, jumlah tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dengan dasar “ (Jumlah Unsur + 1) x 10 atau (9 +1) x10 = 150 Responden. Responden dipilih secara acak.

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing ke 9 unsur pelayanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = 1 = 0,071$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai IKM dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsure yang terisi}}$$

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM unit pelayanan x 25.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,73	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,74 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,25 – 100,00	A	Sangat Baik

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus :

- ☐ Jumlah nilai per-unsur pelayanan = skor x frekuensi
- ☐ Jumlah nilai rata-rata per-unsur = Jumlah nilai per-unsur pelayanan

Responden

☑ Nilai indeks = total jumlah nilai rata-rata

Hasil pengolahan data didapatkan jumlah nilai sebagai berikut :

JUMLAH NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
457	455	456	451	455	456	444	454	454

JUMLAH NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN								
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Dari data table tersebut setelah diolah menggunakan rumus didapatkan nilai seperti di bawah ini :

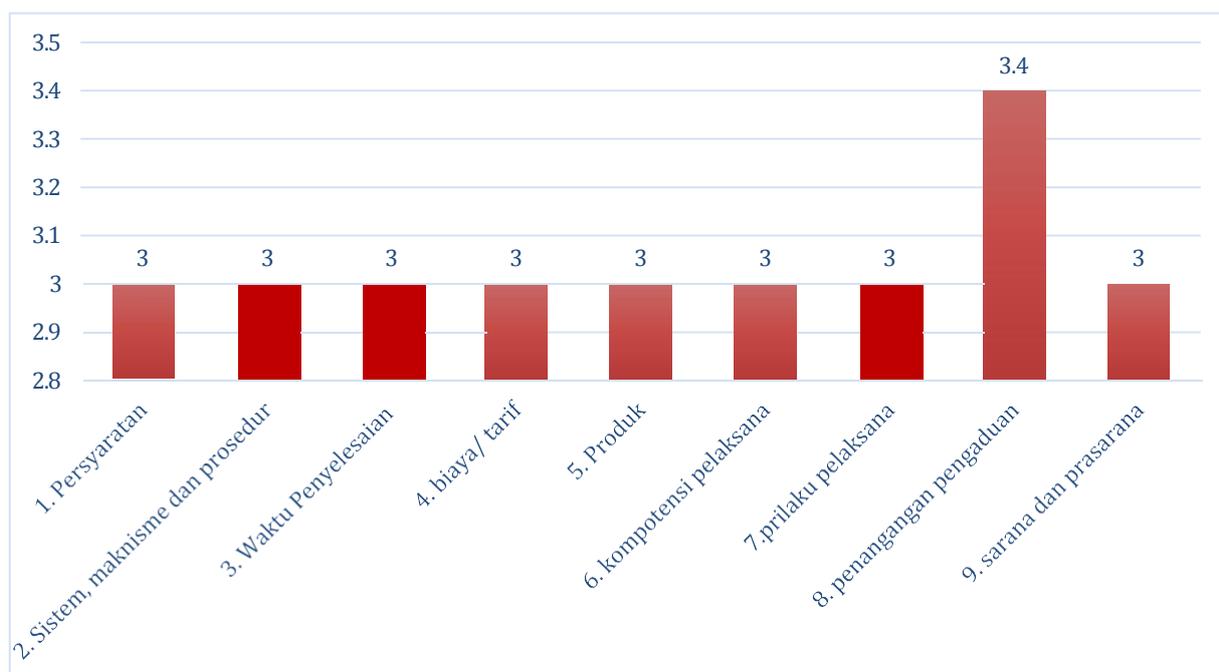
- Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x 25 = 3.0 x 25 = 75
- Mutu pelayanan = B
- Kinerja unit pelayanan = Baik

Dari hasil perhitungan di peroleh skm sebagai berikut :

1. Pesyaratan	3.0
2. Sistem, Mekanisime dan Prosedur	3.0
3. Waktu Penyelesaian	3.0
4. Biaya/Tarif	3.0
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.0
6. Komptensi Petugas Pelayanan	3.0
7. Prilaku Pelaksanan	3.0
8. Penanganan pengaduan saran dan masukan	3.0

9. Sarana dan Prasarana	3.0
NILAI RATA - RATA PER UNSUR TERTIBANG X 0,071	3.0

IKM Per Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar



ANALISIS HASIL SKM

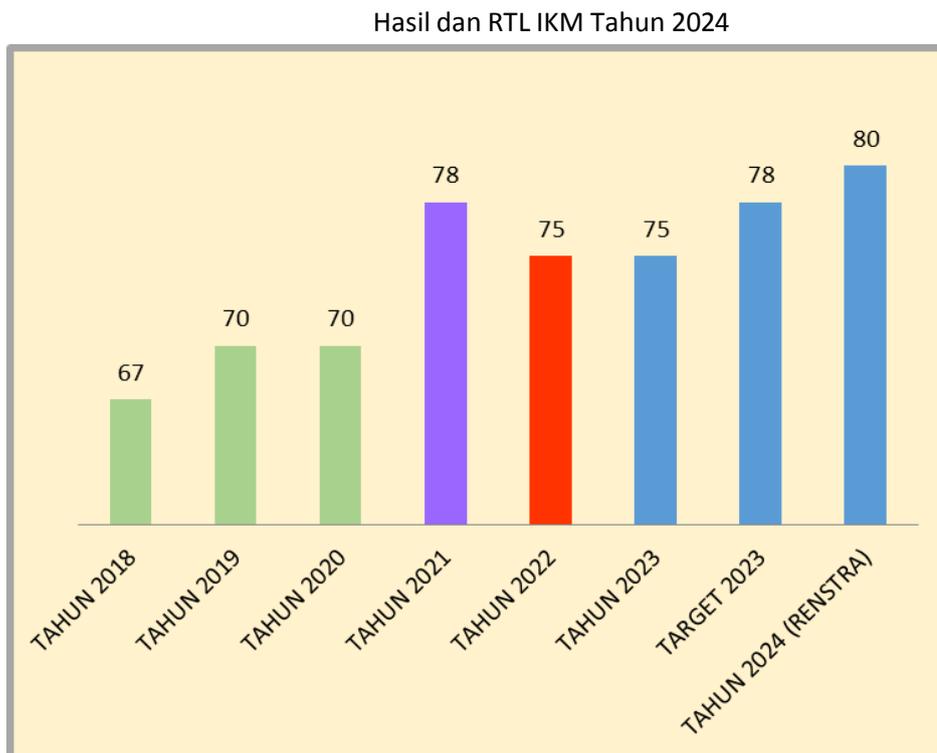
1.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Dari tabel karakteristik Jawaban Responden di atas, didapatkan ada 4 unsur yang terdapat pendapat responden yang menyatakan bahwa :

- Kejelasan dan Kepastian petugas melayani (U3) : 1 responden menyatakan masih kurang jelas.
- Kedisiplinan petugas dalam melayani (U4) : 2 responden menyatakan masih belum disiplin
- Kecepatan Pelayanan (U7) : 10 responden menyatakan masih kurang cepat, ini terkait dengan kepastian.
- Ketepatan Pelaksanaan dan jadwal waktu Pelayanan (U12) : 2 responden masih menyatakan kadang-kadang tepat.
- Kenyamanan lingkungan (U13) : 1 masih menyatakan kurang nyaman.

Tabel III.12



Kinerja Dasar
dari 2018-2023
67%

Capaian Kinerja
Dasar target
2023
=75%/77%
96%

Capaian Kinerja
Dasar
dari 2018-2023
= 75/80
83%

Kinerja pelayanan berdasarkan survei IKM Dinas Perhubungan, tahun 201-2023 mengalami Penurunan 3 poin dengan capaian kinerja 96%. Selama tahun 2023 melampaui target dan realisasi, begitu juga dengan capaian kinerja mencapai 83%. Dan jika di bandingkan dengan target renstra Capaian ini, dan erupakan 93% dari target akhir tahun Renstra pada tahun 2024.

Sumber daya, Kendala dan Solusi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.13
Realisasi Anggaran
Indikator IKM Tahun 2024

Dari target indeks kepuasan masyarakat sebesar dengan poin 76 dan hanya terealisasi 75 poin dalam artian kinerja mencapai 96%. Meskipun begitu, penilaian ini termasuk kategori BAIK, i.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator IKM pada tahun 2021, terlihat pada gambaran di bawah ini :

KENDALA

- ❑ Sarana prasarana pelayanan dalam kondisi butuh banyak perbaikan;
- ❑ Gedung kantor yang kurang layak;
- ❑ Kapasitas Petugas pelayanan yang masih terbatas dan berstatus PTT.

SOLUSI

- Penyesuaian kinerja
- ❑ Memaksimalkan penataan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan;
 - ❑ Pemeliharaan gedung kantor;
 - ❑ Menekankan kedisiplinan serta pendekatan kekeluargaan terhadap
 - ❑ petugas



SASARAN 3

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah**

Indikator

Predikat SAKIP

Target

BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dapat dilihat dari perencanaan kinerja yang terdiri dari Renja, RKA-DPA dan pelaporan akuntabilitas. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dilakukan untuk mengeksekusi program kegiatan dari sebuah DPA. Perencanaan Kinerja dilakukan secara bertahap yang diakhiri oleh PK dan Rencana Aksi. Pengukuran kinerja juga dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran dan indikator serta target yang telah ditentukan. Laporan Kinerja tahunan berupa LAKIP yang diakhiri dengan review oleh Inspektorat. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan sebagai berikut :

TAHUN	PREDIKAT
TAHUN 2017	C
TAHUN 2018	C
TAHUN 2019	B
TAHUN 2020	BB
TAHUN 2021	BB
TAHUN 2022	BB
TAHUN 2023	BB
TAHUN 2024 (RENSTRA)	
TAHUN 2024 (RENSTRA)	A

Berdasarkan pada hal di atas bahwa rentang tahun 2017-2024, terdapat peningkatan predikat SAKIP. Dari yang stagnan pada 2017-2018 pada predikat nilai C, maka 2018-2019 meningkat menjadi B pada tahun 2022 dengan predikat BB dan pada Tahun 2023 dapat mempertahankan posisi pada Predikat BB. hal ini belum mencapai tarhet akhir tahun Renstra, yakni predikat A.

Sumber daya, Kendala dan Solusi
Indikator Predikat SAKIP

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Predikat SAKIP dengan Predikat BB, merupakan realisasi yang sesuai target. Dari sisi realisasi program kegiatan terlaksana 100%.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator Predikat SAKIP pada tahun 2023, terlihat pada gambaran di bawah ini :

KENDALA

- ❑ Pengelolaan data dan kinerja perencanaan yang sentralistik; pada subag perencanaan;
- ❑ Pengukuran kinerja dan transparansi penilaian SAKIP belum optimal.





SASARAN 3

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator

Opini Pengelolaan Keuangan

Target

WTP

Berdasarkan pada capaian Opini WTP Kabupaten Polewali Mandar dalam 2 tahun terakhir, maka diharap Dinas Perhubungan menjadi bagian integral dari bersihnya pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Sumber daya, Kendala dan Solusi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Opini Pengelolaan Keuangan selalu merujuk pada capaian kinerja pengelolaan keuangan Daerah yang WTP. Untuk mendukung hal tersebut, realisasi program kegiatan terkait pengelolaan keuangan terlaksana 100% dan capaian kinerja mencapai 100%.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada tahun 2022, terlihat pada gambaran di bawah ini :

K E N D A L A

- ❑ Besarnya risiko pengelola keuangan;
- ❑ Minimnya pembekalan kapasitas pengelola keuangan;
- ❑ Belum optimal administrasi pengelolaan aset.



SOLUSI

- ❑ Penyesuain kerja
- ❑ Optimalisasi pendampingan terhadap pengelola keuangan perangkat daerah ;
- ❑ Rutinitas pembekalan kapasitas pengelola keuangan;
- ❑ Terus mengupayakan komunikasi dan koordinasi terkait pencatatan aset.

B. **Akuntabilitas Keuangan**

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. **Realisasi Pendapatan Tahun 2023**

Target pendapatan sebesar Rp 2 sementara realisasi Rp 416.650.000 kurang dari target Rp. 430.000.000. Artinya, realisasi PAD sebesar 96.65%.

Tabel III.16
Target dan Realisasi PAD Tahun 2024

			: DINAS PERHUBUNGAN										
			: Drs. H.ACO DJALALUDDIN, AM, M.Si										
			: DARMAWATI										
			: DESEMBER 2024										
KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI				
			PENERIMAAN	PENYETORAN	SISA	PENERIMAAN	PENYETORAN	SISA	JUMLAH ANGGARAN YANG TERALISASI	JUMLAH ANGGARAN YANG TELAH DISETOR	SISA YANG BELUM DISETOR	SISA PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6 = (5-4)	7	8	9 = (8-7)	10 = (4+7)	11 = (5+8)	12 = (11-10)	13 = (3-11)	
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Terminal	30.000.000	10.900.000	10.900.000		10.710.000	10.710.000		21.610.000	21.610.000		8.390.000	
	(Sewa Ruang)		10.900.000	10.900.000		10.200.000	10.200.000		21.100.000	21.100.000			
	(TPR)		-	-		510.000	510.000		510.000	510.000			
4.1.02.02.05.0001	Ret. Tempat Parkir Khusus	400.000.000	328.056.000	328.056.000		65.944.000	65.944.000	-	394.000.000	394.000.000	-	6.000.000	
	Parkir Husus		328.056.000	328.056.000		65.944.000	65.944.000		394.000.000	394.000.000			
	JUMLAH	400.000.000	338.956.000	338.956.000		76.654.000	76.654.000		415.610.000	415.610.000		6.000.000	

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Retribusi tempat parkir khusus memiliki persentase yang paling tinggi dengan capaian 98.50%, sedangkan capaian paling rendah adalah Retribusi TPR Sewa ruang 72.03%.

Hal tersebut dikarenakan bahwa potensi parkir RSUD yang tidak lagi di kelolah oleh dinas perhubungan melainkan sudah di kelola oleh pihak RSUD sendiri

Untuk target retribusi parkir, tahun 2024 terjadi Penurunan target Rp. 400.000.000 dari tahun 2023 Rp 670.000.000 Asumsi ini dikarenakan pengelolaan parkir di Pasar Sentral, Pasar Baru dan Pasar Wonomulyo yang akan dikelola oleh pihak ketiga namun pada tahun hanya pasar Wonomulyo yang di kelolah oleh pihak ketiga sedangkan parkir RSUD mengajukan permohonan untuk mengelola parkir di RSUD Polewali Mandar melalui BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Dari capaian target secara keseluruhan, terdapat kekurangan Rp. 14.390.000., hal tersebut terkait dengan pengelolaan parkir RSUD yang sudah mengelolah sendiri Retribus Parkirnya namun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selesainya tender pasar wonomulyo dan pada pengujian kendaraan bermotor terdapat kekurangan karena kurangnya kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

PAGU anggaran sebesar Rp 3.698.750.731, realisasi Rp. 3.632.281.964 sisa anggaran sebesar Rp. 206.178.789 atau terealisasi sebesar 98.21%. Adapun perincian realisasi belanja daerah ini berasal dari

1. Realisasi Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 7.271.091.646 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 7.659.843.675 atau terealisasi sebesar 97.3% dengan perincian terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.867.877.774,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 2.960.361.631 atau realisasi 98.01%;
- b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 1.815.859.519 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 1.815.753.300 .00atau realisasi 100%.
- c. Belanja Bantuan Sosial 85.500.000 Realisasi 85.446.000, atau sebesar 98,04 %

2. Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp594.537.504,00apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 atau terealisasi sebesar 100.00% dengan perincian terdiri dari :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi Rp. 594931000 dibandingkan anggaran Rp. 594.537.504,00 atau terealisasi sebesar 99.93%;

NO. REK.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023	LEBIH / KURANG	%
4	PENDAPATAN	683,300,000.00	31,484,500.00	(651,815,500.00)	4.61
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	-	-	0.00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	0.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	683,300,000.00	31,484,500.00	(651,815,500.00)	4.61
	Pendapatan Lainnya				
5	BELANJA	7,866,022,464.00	7,659,843,675.00	290,078,789.00	97.38
5.1	BELANJA OPERASI	7,271,091,464.00	7,065,306,171.00	289,685,293.00	97.17
5.1.1	Belanja Pegawai	2,398,391,782.00	2,324,706,269.00	73,685,513.00	96.93
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,872,699,682.00	4,740,599,902.00	132,099,780.00	97.29
5.1.3	Belanja Bunga			-	
5.1.4	Belanja Hibah	0	0	83,900,000.00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial			-	
5.2	BELANJA MODAL	594,931,000.00	594,537,504.00	393,496.00	99.93
5.2.1	Belanja Modal Tanah			-	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	594,931,000.00	594,537,504.00	393,496.00	99.93
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0.00	0.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	0.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-	
	SURPLUS/DEFISIT	(7,182,722,464.00)	(7,628,359,175.00)	(941,894,289.00)	106.20

3. Aset

a. Aset Tetap

Nilai aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan laporan keuangan *audited* tahun 2023 adalah Rp 13.923.479.100,00.

Perhitungan nilai aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.998.170.700,00 atau terdapat penambahan nilai aset tetap pada tahun 2023 sebesar Rp594.537,504 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp R393.496 :

Saldo per tanggal 31 Desember 2023	Rp.	13.923.479.100,00
Penambahan di Tahun 2023	Rp.	594.537,504
Pengurangan Tahun 2023		313496
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023		14.517.703.108,00

b. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Perhubungan kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2023 terdapat tidak ada penambahan senilai sehingga

saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut :

☐	Saldo per tanggal 31 Desember 2023	Rp.	0,00
☐	Penambahan di Tahun 2023	Rp.	0
☐	Pengurangan Tahun 2023	Rp.	0
	Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023	Rp.	0,00

Tabel III.18
Total Pagu dan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Direvisi	
					I		II		III		IV			
					Korner	Rp	Korner	Rp	Korner	Rp	Korner	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Komunikasi Publik	Perencanaan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%		40%		50%					40%		
		Perencanaan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	3.436.683,137	40%	587.892,662	50%	917.734,009		988.073,659		40%	3.370.932,517	
		Perencanaan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu	90%		11%		42%					11%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	11.840,550	40%		50%		100%		100%	11.840,550	100%	11.840,550
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.631,982	1 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen	10.631,982	6 Dokumen	10.631,982
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.208,568	1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen	1.208,568	4 Dokumen	1.208,568
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase penyempurnaan BPM sesuai standar dan tepat waktu	100%	2.636.715,144	21%	542.192,642	36%	777.007,612	21%	752.025,229		565.489,641	76%	2.636.715,144,00
2.1	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menemua Gaji dan Tunjangan ASN	476 Org/Bln	2.636.715,390	102 Org/Bln	542.192,642	170 Org/Bln	777.007,612	102 Org/Bln	752.025,229	102 Org/Bln	564.555,987	476 Dokumen	2.636.715,390
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	933,754	0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan	933,754	2 Dokumen	933,754
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Terlibat Administrasi Umum Kantor	100%	125.967,735	11%		42%			30.322,900		86.144,835	11%	116.467,735,00
3.1	Pelayanan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan yang Disediakan	3 Jenis	14.487,942	1 Jenis		1 Jenis		0 Jenis		1 Jenis	14.487,942	3 Jenis	14.487,942,00
3.2	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	7.245,000	1 Jenis		2 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	7.245,000	5 Jenis	7.245,000,00
3.3	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	33 Jenis	14.969,393	3 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis	8.369,393	33 Jenis	8.369,393,00
3.4	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	88.365,400	5 Laporan		25 Laporan		0 Laporan	30.322,900	20 Laporan	58.042,500	50 Laporan	88.365,400,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100%	572.611,691	25%	45.700,000	25%	140.726,397	100%	186.725,530	100%	144.820,137	100%	510.460,472
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.329,220	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan	3.329,220	12 Laporan	3.329,220
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	20.881,871	3 Laporan		3 Laporan	3.626,397	3 Laporan	3.925,530	3 Laporan	4.399,917	12 Laporan	13.431,252
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	548.400,000	3 Laporan	45.700,000	3 Laporan	137.100,000	3 Laporan	182.800,000	3 Laporan	137.100,000	12 Laporan	502.700,000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai BERSMD	100%	84.448,617	20%		40%		80%	19.000,000	100%	65.448,616	100%	84.448,616,00
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pakat dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dikawatir Pajak dan Perizinannya	4 Unit	78.566,039	1 Unit		2 Unit		0 Unit		1 Unit	59.566,036	4 Unit	78.566,036
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	5.882,580	0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit	5.882,580	1 Unit	5.882,580
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perentase Angkutan Publik yang Memenuhi Standar Kelembagaan	72,81%		40%		30%					30%		
		Perentase Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	94,02%	268.067,594	0%		100%			83.981,798		177.467,649	100%	261.449,447
		Perentase Titik Rawan Kecelakaan yang Aman	78,33%		25%		25%					25%		
1	Penyediaan Peralengkapan Jalan di Jan Kabupaten/Kota	Dukungan Terhadap 96,55 Persen Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	100%	103.953,792	0%		100%		0%	56.743,500		47.096,922	100%	103.940,422
1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Piasarana Jalan	Jumlah Piasarana Jalan yang Terahilitasi dan Terepalihara	11 Unit	103.953,792	0 Unit		11 Unit		0 Unit	56.743,500		47.096,922	11 Unit	103.940,422
2	Pengaloban Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Dikelola	1 Unit	6.538,830	0%							6.533,500		6.533,500
2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	6.538,830	0 Unit		0 Unit		0 Unit			6.533,500		6.533,500
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Penerbitan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 Laporan	30.283,121	25%		25%		25%	1.035,000	3 Laporan	23.167,464	4 Laporan	30.202,464
3.1	Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.283,121	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan	1.035,000	3 Laporan	23.167,464	12 Laporan	30.202,464
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	1045 Dokumen	88.018,088	40%		30%	0	92%	26.203,298	195%	55.396,000	181%	81.599,298
4.1	Penyediaan Bukal Laju Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukal Laju Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1045 Dokumen	10.116,320	511 Dokumen		308 Dokumen	0	470 Dokumen	14.016,320	603 Dokumen	1893 Dokumen	14.016,320	
4.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Unit	68.901,768	0 Unit		0 Unit		0 Unit	12.188,978	1 Dokumen	55.396,000	1 Unit	67.582,978
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600 Laporan	27.015,277	9%		62%		14%		21%	27.015,277	104%	27.015,277
5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600 Laporan	27.015,277	51 Laporan		370 Laporan		82 Laporan		123 Laporan	27.015,277	626 Unit	27.015,277
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan Pemantauan unte Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	2.245,111	25%		25%		25%		25%	2.245,111	100%	2.245,111
6.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unte Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unte Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	2.245,111	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	2.245,111	4 Laporan	2.245,111
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	10.013,375	25%		25%		25%		25%	10.013,375	100%	10.013,375
7.1	Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	10.013,375	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	10.013,375	4 Laporan	10.013,375
Jumlah				3.696.798,791		587.892,662		917.734,009		1.072.052,467		1.053.226,428		3.826.387,394
													Kelompok Pokok Organisasi (KPO) yang dipantau	
													Produksi Kinerja	
													1 ORANG	
													12	
													Lulusun Tanggal : 16 Januari 2025	
													Kabupaten Lingsar Mempangan	
													Drs. Aca Djaliluddin AM M Si	
													Pangkat : Pemangia Utama Madya	
													NIP. : 1969123119960212008	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran awal Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebesar dinas perhubungan sebesar 3.698.750.731 realisasi 3.632.381.atau sebesar 98.21%



BAB IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun untuk memaparkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2024.

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran, program dan kegiatan dengan masing-masing indikatornya. Dari hasil analisa akuntabilitas dan pengukuran kinerja, maka dapat disimpulkan :

1. Sasaran : Meningkatnya kinerja transportasi dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2024, target 120 kejadian Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas), sementara Lakalantas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 312 kasus, sehingga capaian kinerja 39%. Berdasarkan itu, maka angka Lakalantas Tahun 2024 mengalami Peningkatan 3% dari 311 kejadian pada tahun 2023.

2. Indikator Program : Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik

Sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik, target kinerja 96.55% dan realisasi 93.31%, dalam artian capaian kinerja mencapai 97%.

Tahun 2024, tidak ada pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan masih pada angka 1216 unit.hanya terjadi penambahan pemeliharaan portal 11 Unit hal ini di sebabkab pada tahun 2024 24 terjadi rekkofusing anggaran

3. Indikator Program : Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman
Pada Tahun 2024, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 74% dan realisasi 118%, dalam artian terdapat kenaikan capaian kinerja mencapai 60%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.
4. Indikator Program : Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan. Pada tahun 2024, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 52.32% realisasi 100% capaian kinerja 104%.
5. Indikator sasaran pada segmen manajemen perkantoran, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan : IKM dengan mutu pelayanan A (Baik), Predikat SAKIP BB dan Opini Keuangan WDP;
6. Realisasi keuangan, PAGU anggaran sebesar Rp 3.698.750.731 realisasi Rp. 3.632.381.964 atau terealisasi sebesar 98.21%.
7. Terdapat 11 kegiatan pada 2 program: *pertama*, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Kegiatan Pertama Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kedua Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ketiga Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah keempat Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program kedua Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pertama Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota kedua Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C ketiga Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir keempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kelima Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota keenam Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ketujuh Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran atau rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Terkait angka kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar, baiknya lebih mengintensifkan pencegahan dengan inspeksi dan pengawasan serta pemasangan PJU;
2. Sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, baiknya dipermantap kualitas dan kuantitasnya;
3. Titik rawan kecelakaan tertib dan aman, baiknya dilakukan pengawasan ketat dan optimalisasi rambu keselamatan lalu lintas;
4. Angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, baiknya melakukan terobosan untuk meningkatkan kuantitas kendaraan laik jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan darat;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perhubungan, baiknya dilakukan pembenahan terencana pada segmen sarana dan kualitas petugas pelayanan;
6. Terkait Predikat SAKIP A, baiknya dilakukan perencanaan secara integral seluruh elemen instansi dan secara berjenjang;
7. Opini WTP, baiknya diikuti dengan efisiensi penganggaran dan berorientasi pada tunjangan berbasis kinerja;
8. Terkait PAD, baiknya berbagai sektor juga ikut menyokong pencapaian kerjanya disamping modernisasi perlengkapan pendukung dan efektifitas pengelolaan serta pengawasan yang didorong oleh kepastian regulasi.
9. Baiknya, pandemi disikapi dengan berbagai kegiatan efektif yang berorientasi pada keselamatan bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek kinerja organisasi.

Pemaparan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan terhadap publik dan Pemerintah serta stakeholder lainnya. Laporan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyempurnaan strategi pencapaian sasaran kinerja.

Dengan Data capaian kinerja yang telah diuraikan pada laporan ini, serta kendala dan upaya-upaya yang telah dilakukan, diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan semakin baik, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan



LAMPIRAN

Lampiran 1 (Perjanjian Kinerja Dishub Tahun 2024)

Lampiran 2 (Pengukuran Kinerja Dishub Tahun 2024)

Lampiran 3 (Realisasi Anggaran Dishub Tahun 2024)

Lampiran 1; Perjanjian Kinerja Dishub 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Mr. Muh. Yamin N0. 07 Pekkabata, Tlp/Fax (0428) 21943
Website : www.dishub.polmankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Aco Djalaluddin, AM.,M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. Muhammad Ilham Borahima**
Jabatan : Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Polewali Mandar

Drs. Muhammad Ilham Borahima

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Aco Djalaluddin, AM.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19651231 199203 1 260

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Sangat Baik

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.667.545.834	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.044.492.035	APBD
Jumlah	Rp. 4.712.037.869	

Pihak Kedua
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR



Drs. Muhammad Ilham Borahima

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Drs. Aco Djalaluddin, AM., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19651231 199203 1 260

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEHUBUNGAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai yakni Meningkatnya kinerja transportasi daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	(S ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan/SKebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan)X 100%	Berdasarkan laporan Lakalantas dari Polres Polman
2		menggambarkan peningkatan kinerja transportasi daerah dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan		
3		semakin baik		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	100 Kejadian	berdasarkan hasil rencana strategis dalam dari tahun ke tahun adanya penurunan angka kecelakaan namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan angka kecelakaan yaitu 311 kejadian

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Indikator Program : Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman

Pada Tahun 2023, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 77,14% dan realisasi 77,14%, dalam artian capaian kinerja mencapai 100%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.

Indikator Kinerja

Tingkat keberhasilan didasari pada pencapaian target pada indikator sebagai berikut:

1. Persentase pengawasan dan pengamanan titik lokasi rawan kepadatan/kemacetan Lalu Lintas 1
2. Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik
3. Persentase pengelolaan parkir yang tertib

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	<i>Tingkat kematangan berdasarkan persentase</i>	<i>Tingkat kematangan dengan mempertimbangkan indikator terdiri atas Indikator, dimana masing-masing level</i>	<i>(S Lokasi pengamanan/STitik rawan kecelakaan)X 100%</i>	<i>Bidang Lalulintas</i>

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Tingkat kematangan berdasarkan persentase	Menurunnya Titik rawan kecelakaan	Pada Tahun 2023, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 77,14% dan realisasi 77,14%, dalam artian capaian kinerja mencapai 100%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Persentase Angkutan umum yang memiliki standar Keselamatan

pada tahun 2023, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 54,45% realisasi 54,45% capaian kinerja 100%. .

Indikator Kinerja

Persentase Angkutan umum yang memiliki standar Keselamatan peningkatan dalam transportasi kendaraan sehingga dalam dengan pemenuhan standar keselamatan dapat mengurangi angka kecelakaan dengan indikator

1. Persentase Layanan angkutan darat
2. Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek
3. Persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Optimalnya keselamatan angkutan orang dan barang serta kendaraan bermotor lainnya	Data sektoral yang memenuhi standar data dan mudah diakses secara online yang dihasilkan oleh produsen data mendorong peningkatan kualitas data statistik sektoral	$(S \text{ pelayanan angkutan darat} + S \text{ angkutan umum sesuai standar})/2$	Bidang Angkutan

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	54.45%	pada tahun 2022, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 52.32% realisasi 100% capaian kinerja 156%.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Adapun sasaran yang ingin dicapai yakni Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Dinas Perhubungan P
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	<u>Jumlah seluruh IKP layanan</u> x 100 Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan	Sekretariat Dinas Perhubungan

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A (86,00) tahun 2023 optimis diraih Dinas Perhubungan, dengan melihat Capaian SAKIP Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2021 (Predikat BB; 82,76), tahun 2022 (Predikat B;85,94) dan tahun 2023 (predikat A;85,94)
2 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Dinas Perhubungan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (98,87%), 2021 (100%) serta 2022 (100%)
3 Indeks kepuasan	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)

masyarakat/stakeholder	yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM, 2021 (Predikat Sangat Baik;97,04) 2022 (Predikat Sangat Baik;98,79), 2023 (Predikat Sangat Baik;98,79) Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predkat sangat baik tahun 2024
------------------------	--

Lampiran 2; Pengukuran Kinerja Dishub 2024

ADMINISTRATOR

SISTEM INFORMASI KINERJA INTEGRATED

Pengukuran Kinerja Eselon II

Pengukuran Kinerja Pengukuran Anggaran Kendala dan Solusi

No	Tahun	Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target												Kinerja(%)	Aksi
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2024	Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks infrastruktur perhubungan	angka	81,89%			11,89%			20%			25%		25%	81,89	100	
2	2024	Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	predikat	Baik										Baik	NaN	100		
3	2024	Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	persen	100			25			25			25		25	100,00	100,00	
4	2024	Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	predikat	A										A	NaN	100		
5	2023	Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks infrastruktur perhubungan	angka	100%			25			25						50	50,00	
6	2023	Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	predikat	Sangat										Sangat	Sangat	100,00	100,00	

Lampiran 3;
Realisasi Keuangan Dishub 2024

II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Angkutan Publik yang Memenuhi Standar Keselamatan	72.81%		49%		30%				30%						
		Persentase Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	94.02%	288,067,594	0%		100%		83,981,798		177,467,649	100%	281,449,447		97.53%		
		Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Aman	78.33%		25%		25%					25%					
1	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dukungan Terhadap 96,55 Persen Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	100%	103,953,792	0%	-	100%	-	0%	56,743,500	47,096,922	100%	103,840,422	100%	100%		
1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 Unit	103,953,792	0 Unit	-	11 Unit	-	0 Unit	56,743,500	0 Unit	47,096,922	11 Unit	103,840,422	100%	100%	Pemeliharaan Warning 20 Unit, dan PJU Double Arm 20 Unit di Rekolusing Sisa 11 Unit Portal
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Dikelola	1 Unit	6,538,830	0%	-	-	-	-	6,538,830	0%	6,533,500	6,533,500	0%	99.92%		
2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	6,538,830	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	6,533,500	0 Unit	6,533,500	0.00	99.92%	Realisasi Fisk belum teralisasi berupa penimbunan terminal Tipe C Wonorejo
3	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 Laporan	30,283,121	25%	-	25%	-	25%	1,035,000	3 Laporan	29,167,464	4 Laporan	30,202,464	100%	99.7%	
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30,283,121	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	1,035,000	3 Laporan	29,167,464	12 Laporan	30,202,464	100%	99.7%	Pengadaan Rompi petugas Parkir sudah teralisasi 100 buah (100 %)
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	1045 Dokumen	88,018,088	49%	-	30%	0	92%	26,203,298	195%	55,396,000	181%	81,598,298	181%	86%	
4.1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1045 Dokumen	19,116,320	511 Dokumen	-	309 Dokumen	0	470 Dokumen	14,016,320	603 Dokumen	1893 Dokumen	14,016,320	181.15	73%	Jumlah Kendaraan yang melakukan uji KR	
4.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Unit	68,901,768	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	12,186,978	1 Dokumen	55,396,000	1 Unit	67,582,978	100.00	98%	Teralisasi Pemeliharaan Peralatan Alat uji KIR
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600 Laporan	27,015,277	9%	-	62%	-	14%	-	21%	27,015,277	104%	27,015,277	104%	100%	
5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600 Laporan	27,015,277	51 Laporan	-	370 Laporan	-	82 Laporan	-	123 Laporan	27,015,277	626 Unit	27,015,277	104%	100%	Jumlah Laporan Pengamanan Lalulintas
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan Pemantauan unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	2,245,111	25%	-	25%	-	25%	-	25%	2,245,111	100%	2,245,111	25%	100%	
6.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	2,245,111	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	2,245,111	4 Laporan	2,245,111	100.00	100%	Jumlah Laporan Inspeksi/audit dan pemantauan yang di Keluarkan dalam 3 Bln
7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	10,013,375	25%	-	25%	-	25%	-	25%	10,013,375	100%	10,013,375	100%	100%	
7.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	10,013,375	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	10,013,375	4 Laporan	10,013,375	100.00	100%	Jumlah Izin Trayak yang di Keluarkan dalam 6 Bln
Jumlah				3,698,750,731	587,892,662		917,734,009		1,072,055,457		1,053,220,428		3,632,381,964		98.21%		
Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan																	
Predikat Kinerja																	

